

**STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

(Tesis)



**OLEH
ANNISA ALIFA RAMADHANI**

**MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRACT

STRATEGY OF DISADVANTAGED REGIONS DEVELOPMENT IN WEST LAMPUNG DISTRICT

By

Annisa Alifa Ramadhani

This thesis focuses on selecting the best strategy for West Lampung district in developing its area, by using SWOT and AHP analysis approach. This study uses two questionnaire instruments, namely SWOT questionnaire and AHP questionnaire. The result of this research concludes that the development target that must be prioritized is to build the supporting infrastructure of agriculture to develop the leading commodity center area.

Keywords: Policy strategy, disadvantaged regions development, SWOT, AHP.

ABSTRAK

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Oleh

Annisa Alifa Ramadhani

Tesis ini berfokus pada pemilihan strategi terbaik bagi Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan pengembangan daerahnya, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT dan AHP. Penelitian ini menggunakan 2 instrumen kuisisioner, yaitu kuisisioner SWOT dan kuisisioner AHP. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pembangunan yang harus diprioritaskan adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan sentra komoditas unggulan.

Kata kunci: Strategi kebijakan, Pembangunan Daerah Tertinggal, SWOT, AHP.

**STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Oleh

ANNISA ALIFA RAMADHANI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Tesis : **STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DI KABUPATEN LAMPUNG
BARAT**

Nama Mahasiswa : **Annisa Alifa Ramadhani**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1621021008

Konsentrasi : Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah

Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Lampung



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.
NIP 19560325 198303 1002

Dr. Arivina Ratih Taher, S.E., M.M.
NIP 19800705 200604 2002

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung

Ketua Program Studi

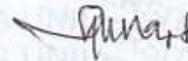
Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.
NIP 19611209 198803 1003

MENGESAHKAN

1. Komisi Penguji

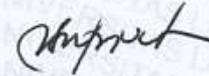
1.1. Ketua Komisi Penguji
(Pembimbing I)

: Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si



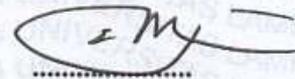
1.2. Anggota Komisi Penguji
(Penguji I)

: Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si



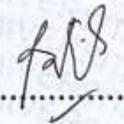
1.3. Anggota Komisi Penguji
(Penguji II)

: Dr. Marselina, S.E., M.P.M.



1.4. Sekretaris
(Pembimbing II)

: Dr. Arivina Ratih T, S.E., M.M.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1011

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Drs. Mustofa, MA., Ph.D.
NIP 19570101 198403 1020

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : 29 Juni 2018

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan Judul “Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Lampung Barat” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*;
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juli 2018
Yang Membuat Pernyataan



Annisa Alifa Ramadhani
NPM. 1621021008

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 26 Februari 1994. Sebagai anak pertama dari pasangan bapak Edi Sutrisno dan ibu Siti Aspiah. Pendidikan formal awal penulis ditempuh di SD Muhammadiyah Pringsewu diselesaikan tahun 2006, SMPN 1 Pringsewu diselesaikan tahun 2009, SMAN 1 Gadingrejo di kelas akselerasi yang diselesaikan pada tahun 2011.

Pada tahun 2011, penulis diterima sebagai mahasiswa Strata 1 (S1) pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN tertulis. Selama menempuh pendidikan S1 penulis aktif pada beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Lampung yaitu sebagai *Manager Marketing and Finance* Radio Kampus Universitas Lampung, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA), EEC (*Economics' English Club*). Selain itu penulis juga pernah menjadi surveyor konsumen di Bank Indonesia pada tahun 2015.

Setelah lulus kuliah, penulis memiliki beberapa pengalaman kerja. Penulis saat ini bekerja di salah satu perusahaan *fintech* multinasional. Tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung.

MOTTO

Kebahagiaan hakiki adalah ketika bisa membuat orang sekitar kita bahagia.

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit”

(Imam Ali Bin Abi Thalib AS)

“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat.”

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, sebagai rasa syukur atas ridho serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Kupersembahkan tesis ini kepada:

Kedua orangtuaku, seluruh keluargaku, terima kasih atas doa, kesabaran, motivasi, bimbingan dan saran yang selama ini tak henti diberikan.

Dosen-dosen serta sahabat-sahabat terbaik yang turut memberikan saran, motivasi, juga doa yang menambahkan semangat dalam penyelesaian tesis ini, serta almamater UNILA tercinta yang selalu ku banggakan.

SANWACANA

Segala puji syukur hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Sungguh, tiada daya dan upaya melainkan karena pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Lampung Barat” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan ilmu, arahan, motivasi serta saran dalam penyusunan tesis penulis;
2. Ibu Dr. Arivina Ratih, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, arahan, dan motivasi selama ini;
3. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi sekaligus Dosen Penguji. Terima kasih untuk segala nasihat, motivasi dan saran-saran selama penulis menempuh pendidikan di program Pascasarjana Ilmu Ekonomi dan selama proses penyusunan tesis ini;
4. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M., selaku dosen penguji, terima kasih untuk segala masukannya demi perbaikan tesis ini;
5. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Lampung;
7. Seluruh staff dan karyawan Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Lampung;
8. Semua Pihak yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta doa dalam penyelesaian tesis ini, tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis ini dapat berguna bagi kita semua. Aaamiin.

Bandar Lampung, Juli 2018

Annisa Alifa Ramadhani

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Pembangunan Ekonomi	10
2.2 Pembangunan Ekonomi Daerah	12
2.3 Daerah Tertinggal	14
2.3.1 Pengertian Daerah Tertinggal	14
2.3.2 Kriteria Penentuan Daerah Tertinggal	17
2.4 Konsep dan Definisi Strategi	19
2.4.1 Perencanaan strategis	19
2.4.2 Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah	21
2.5 Analisis SWOT	23
2.6 <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i>	25
2.6.1 Prinsip Penyusunan Hirarki	28
2.6.2 Prinsip Menetapkan Prioritas	30
2.6.3 Kelebihan dan Kelemahan AHP	32
2.7 Kerangka Pemikiran	34
2.8 Penelitian Terdahulu	36
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.2 Teknik Pengumpulan Data	39
3.2.1 Wawancara	39
3.2.2 Dokumentasi	40
3.2.3 Survey	40

3.3 Metode Analisis Data.....	41
3.3.1 Analisis SWOT (<i>Strengths, Weakness, Opportunities, Threats</i>)	41
3.3.2 <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i>	46
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Wilayah	52
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Lampung Barat	53
4.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Lampung Barat.....	54
4.1.3 Pertanian	55
4.1.4 Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kehutanan	62
4.1.5 Kondisi Infrastruktur Kabupaten Lampung Barat	64
4.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68
4.1.7 Potensi Pariwisata.....	69
4.2 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Lampung Barat	71
4.2.1 Struktur Produk Domestik Regional Bruto	71
4.2.2 Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah	72
4.3 Perkembangan Desa Tertinggal di Kabupaten Lampung Barat.....	73
4.4 Perumusan Strategi	76
4.4.1 Hasil dan Analisis SWOT	76
4.4.2 Perumusan Strategi kebijakan denganAHP.....	108
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	129
5.2 Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Aksioma-aksioma dalam Analytical Hierarchy Process (AHP)	26
2.2 Proses Penyusunan Hirarki	30
2.3 Skala Perbandingan Secara Berpasangan.....	31
2.4 Penelitian Terdahulu	37
3.1. Penilaian Terhadap Prestasi Faktor	42
3.2. Penilaian Urgensi	43
3.3. Daftar Responden Kuisisioner SWOT.....	43
3.4. Matriks Faktor Internal dan Eksternal	46
3.5. Matriks SWOT – Interaksi IFAS – EFAS	46
3.6. Skala Perbandingan Secara Berpasangan.....	48
3.7. Daftar Responden Kuisisioner AHP	50
3.8. Pembobotan Responden	50
4.1. Nama-nama dan Luas kecamatan Lampung Barat 2017	53
4.2. Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016 dan Tahun 2017.....	56
4.3. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat (ton)	59
4.4. Populasi dan Produksi Ternak Tahun 2015 dan 2016.	60
4.5. Produksi kegiatan budidaya ikan yang meliputi budidaya ikan di kolam, budidaya di perairan umum (KJA dan Keramba Tancap) dan mina padi.....	61
4.6. Tutupan Lahan Daerah Kabupaten Lampung Barat	62
4.7. Luas Kawasan Hutan Lindung.....	63
4.8. Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Kabupaten Lampung Barat (km), 2016.....	65

4.9. Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Lampung Barat Menurut Status Sekolah dan Kecamatan, 2016.	67
4.10. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Lampung Barat tahun 2013 – 2017	70
4.11. Distribusi Presentase PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lampung Barat 2012 –2016	71
4.12. Perbandingan Status Kemajuan Desa di Kabupaten Lampung Barat, 2014 dan 2017.....	73
4.13. Perumusan Identifikasi Faktor Internal	77
4.14. Perumusan Identifikasi Faktor Eksternal.....	78
4.15. Hasil Penilaian Responden atas Faktor-Faktor Internal	78
4.16. Hasil Penilaian Responden atas Faktor-Faktor Eksternal.....	80
4.17. Ringkasan Pembobotan Faktor-Faktor Internal.....	81
4.18. Ringkasan Pembobotan Faktor-Faktor Eksternal	90
4.19. Penilaian Bobot IFAS – EFAS SWOT	96
4.20. Matriks Interaksi IFAS – EFAS SWOT	99
4.21. Pembobotan Hasil Kuisisioner SWOT	106
4.22. Urutan Alternatif Strategi SWOT.....	106
4.23. Strategi Prioritas I: Strategi Strength – Opportunity (SO).....	107
4.24. Hasil Penghitungan atas Penilaian Responden	111
4.25. Hasil pengolahan AHP Dengan Skenario Optimis.....	114
4.26. Urutan Prioritas Strategi Kebijakan dengan Skenario Optimis	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Dekomposisi (Penyusunan Hirarki)	29
2.2 Kerangka Pemikiran.....	42
3.1 Kerangka Formulasi Strategi.....	41
3.2 Penyusunan Hirarki Model AHP	47
4.1 Peta Kabupaten Lampung Barat	52
4.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Lampung Barat 2016	55
4.3 Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2012-2016 Kabupaten Lampung Barat.....	55
4.4. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Indonesia Tahun 2012-2016	69
4.5 Hirarki Model AHP.....	111

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Responden Kuisisioner SWOT	L-1
2. Kuisisioner SWOT	L-2
3. Daftar Responden Kuisisioner AHP	L-3
4. Kuisisioner AHP	L-4
5. Hasil Pengolahan Data Analisis SWOT	L-5
6. Hasil Pengolahan Data Analytical Hirarchy Process	L-6
7. Surat Izin Penelitian	L-7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pelaksanaan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik, memberi kesempatan pada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, dan meringankan beban pemerintah pusat agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah lebih efektif dan efisien. Faktor pendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah yang stabil, sumber daya manusia yang berkualitas, kemampuan keuangan daerah yang baik, infrastruktur yang memadai, dan kemudahan akses pelayanan publik di daerah. Apabila daerah tidak mampu menciptakan faktor - faktor pendukung sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah, maka tujuan pembangunan daerah akan sulit dicapai. Kegagalan dalam mengembangkan faktor pendukung tersebut menyebabkan timbulnya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan, yang berakibat pada munculnya daerah tertinggal yang miskin dan terbelakang (Syahza, 2012).

Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal (Bappenas, 2006). Sedangkan menurut Kepmen PDT nomor 1 tahun 2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, daerah tertinggal didefinisikan sebagai daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam

skala nasional.

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019 disebutkan, daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Pada Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Daerah Tertinggal secara Nasional, suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria :

- a. perekonomian masyarakat;
- b. sumber daya manusia;
- c. sarana dan prasarana;
- d. kemampuan keuangan daerah;
- e. aksesibilitas; dan
- f. karakteristik daerah.

Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud diukur berdasarkan indikator dan sub indikator. Menurut Perpres, pemerintah menetapkan daerah tertinggal setiap lima tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah. Penetapan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan usulan menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Dalam hal adanya pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah kabupaten atau upaya mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, menurut Perpres ini, presiden dapat menetapkan daerah tertinggal baru.

Target nasional penanggulangan daerah tertinggal sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015 - 2019, sebanyak 122 kabupaten tertinggal, dimana dua diantaranya berada di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan BPS Kabupaten Lampung Barat (2016), Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Dalam bidang pertanian khususnya hortikultura, Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten penghasil sayur mayur terbesar di Provinsi Lampung. Ada empat kecamatan yang merupakan penghasil sayuran terbesar di Kabupaten Lampung Barat, yaitu Kecamatan Way Tenong, Sekincau, Balik Bukit, dan Sukau. Keempat kecamatan ini telah menyuplai beberapa jenis sayuran antara lain kentang, cabai merah, kubis, labu siam, tomat, wortel, buncis, dan sawi dengan luas panen dan jumlah produksi makin meningkat dari tahun ke tahun.

Daya dukung dan perhatian pemerintah Kabupaten Lampung Barat begitu besar, sehingga Kabupaten Lampung Barat mampu menjadi pendistribusi sayur-mayur ke daerah-daerah lain seperti Bandar Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Padang, dan mulai juga menyuplai sebagian Jabotabek. Menurut BPS Kabupaten Lampung Barat (2016), selain menjadi produsen sayuran terbesar di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat juga menjadi produsen kopi terbesar di Provinsi Lampung. Perkebunan kopi di Kabupaten Lampung Barat ini umumnya tumbuh pada ketinggian 400 - 700 meter di atas permukaan laut dengan temperatur 21-24°C. Kabupaten Lampung Barat memiliki kondisi alam yang

cocok untuk menumbuhkan kopi jenis robusta. Hampir tiap daerah di Lampung Barat mempunyai lahan perkebunan kopi robusta, baik yang dikelola pemerintah, swasta, maupun swadaya masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Lampung Barat, luas lahan tanaman kopi di Kabupaten Lampung Barat yaitu 60.347,7 hektar dengan produksi kopi kering per tahun mencapai 29.712 ton perhektar. Setiap tahun, produksi kopi di daerah Kabupaten Lampung Barat selalu meningkat. Itulah sebabnya, Kabupaten Lampung Barat menjadi salah satu figur perkebunan terbaik di Provinsi Lampung. Selain potensi pertanian dan perkebunan, Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi pariwisata yang sangat besar.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2011, Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Provinsi Lampung. Ini dapat dilihat dari banyaknya wisatawan mancanegara maupun nusantara yang datang berkunjung untuk menikmati berbagai objek wisata di Lampung Barat. Objek wisata di Lampung Barat sangat lengkap mulai dari danau, pegunungan, wisata alam, dan wisata petualangan. Untuk pengembangan pariwisata di Lampung Barat, pemerintah kabupaten terus melakukan berbagai upaya seperti penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur. Salah satu lokasi wisata di Kabupaten Lampung Barat yang menjadi bagian dari 88 kawasan strategis pariwisata nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 adalah wilayah Danau Ranau dan sekitarnya.

Pada Tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Lampung Barat mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Trend wisatawan yang berkunjung ke Lampung Barat sebagian besar adalah wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus seperti jelajah alam dan juga penelitian terutama pada situs-situs budaya dan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Menurut BPS Kabupaten Lampung Barat (2017), jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lampung Barat pada tahun 2016 tercatat sebanyak 14.863 orang yang terdiri dari 14.567 orang kunjungan wisatawan nusantara dan 396 orang kunjungan wisatawan mancanegara dan di tahun 2017 naik menjadi 16.449 orang yang terdiri dari 15.918 orang kunjungan wisatawan nusantara dan 531 orang kunjungan wisatawan mancanegara.

Kabupaten Lampung Barat dikategorikan kedalam daerah tertinggal walaupun Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi pertanian, perkebunan dan pariwisata yang besar. Statistik Daerah Kabupaten Lampung Barat (2015) menyebutkan persoalan banyaknya penduduk musiman dan kualitas SDM membuat kawasan ini menjadi daerah tertinggal, dimana masyarakat musiman ini yang sebagian besar datang hanya saat musim panen saja, sehingga menjadikan wilayah ini tampak seperti tak berkembang. Selain itu Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah di Kabupaten Lampung Barat menyebabkan hal ini. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta masing-masing komponennya di Kabupaten Lampung Barat lebih rendah dibanding hal yang sama di Provinsi Lampung. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami kenaikan namun masih dalam urutan tiga terbawah dibandingkan dengan 15 kabupaten dan kota lain di Provinsi Lampung. Menurut BPS Kabupaten Lampung Barat (2015), angka IPM Lampung

Barat hanya mengalami kenaikan yaitu sedikit peningkatan dari 69,72 di 2012 menjadi 70,37 pada 2014, sedangkan Provinsi Lampung 72,87 dan Nasional 73,81. IPM Kabupaten Lampung Barat masih berada di bawah IPM Provinsi Lampung dan IPM Indonesia dan IPM Lampung Barat berada pada urutan ke-13 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Lampung Barat 611,41 ribu rupiah, Provinsi Lampung 628,24 Ribu rupiah, dan Nasional 643,36 ribu rupiah. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Lampung Barat 67,81 tahun, Provinsi Lampung 70,09 tahun, dan Nasional 70,07 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Lampung Barat 7,47 tahun, Provinsi Lampung 7,89 tahun, dan Nasional 8,14 tahun. Kurangnya pendidikan di masyarakat Kabupaten Lampung Barat disebabkan masih banyak anak-anak petani setempat yang tidak ingin melanjutkan sekolah. Meskipun demikian, saat ini dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun, seluruh warga daerah Kabupaten Lampung Barat sudah mau sekolah meski hanya sampai sekolah menengah pertama.

Menurut BPS Kabupaten Lampung Barat (2013), jumlah penduduk miskin Kabupaten Lampung Barat (dalam ribu) sebanyak 65,20 atau sebesar 15,30 persen, sedangkan jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung (dalam ribu) ada sebanyak 1.230,20 atau sebesar 15,65 persen dan penduduk miskin Indonesia (nasional) (dalam ribu) ada sebanyak 28.170,55 atau sebesar 11,37 persen. Dengan demikian persentase penduduk miskin Kabupaten Lampung Barat lebih rendah dibanding dengan persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tetapi lebih tinggi dibanding nasional.

Menurut Bappeda Lampung Barat (2017), pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu isu yang sangat strategis di Kabupaten Lampung Barat hingga saat ini. Hingga bulan Maret Tahun 2017, panjang jaringan jalan kabupaten adalah sebesar 724 Km. Dari jumlah tersebut, sebagian besar 43,57 persen telah berpermukaan aspal/beton, tetapi yang berpermukaan tanah juga masih tinggi yaitu sebesar 33,58 persen. Jika ditinjau menurut kondisinya, sebagian besar jalan di Kabupaten Lampung Barat sampai dengan Maret 2017, jalan dengan kondisi rusak berat masih cukup tinggi yaitu 36,73 persen.

Memiliki kondisi topografis perbukitan dan dataran tinggi serta berada pada patahan vulkanik semangka yang relatif aktif, lebih dari 80 persen desa di Lampung Barat masuk kategori wilayah rawan bencana alam. Mulai dari gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Sementara itu, hanya 14 persen daerah yang relatif aman dari bencana, yang berada di hutan Taman Nasional Bukit Barisan (bukan daerah hunian). Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2016), tercatat telah terjadi 39 jumlah kejadian bencana alam meliputi gempa bumi, dan tanah longsor dengan korban meninggal sebanyak 207 orang. Jumlah ini merupakan angka tertinggi korban meninggal bencana alam di Provinsi Lampung.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa potensi pertanian, perkebunan dan pariwisata begitu besar dimiliki oleh Kabupaten Lampung Barat. Apabila didukung dengan sumber daya manusia yang baik maka Kabupaten Lampung Barat akan keluar dari sebutan daerah yang tertinggal. Sehingga apabila Kabupaten Lampung Barat ingin keluar dari status daerah tertinggal maka dalam

strategi kebijakannya harus memperhatikan penyebab dari terjadinya kesenjangan atau *gap* masalah-masalah tersebut, dengan tetap mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia dan aksesibilitas. Besarnya potensi yang ada di Kabupaten Lampung Barat ternyata masih belum mampu membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terlepas dari statusnya sebagai daerah tertinggal. Ketimpangan antara potensi daerah yang telah diusahakan dan telah menjadi "*branding*" daerah tidak memberikan pengaruh nyata terhadap upaya-upaya pembangunan daerah yang ingin terlepas dari statusnya sebagai daerah tertinggal, dan justru menimbulkan banyak ketidaksinkronan antara rencana tujuan dan target yang tercapai. Hal ini menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul "Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Lampung Barat".

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian secara khusus dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman apa saja yang mempengaruhi pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Lampung Barat?
2. Strategi apa saja yang menjadi prioritas pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Lampung Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman strategi pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Lampung Barat.
2. Merumuskan prioritas strategi pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Lampung Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bahan pertimbangan dalam rangka perencanaan dan penentuan strategi pembangunan di wilayah Kabupaten Lampung Barat.
2. Bahan pertimbangan dan informasi bagi pihak-pihak yang berminat dalam pengembangan Kabupaten Lampung Barat.
3. Sebagai bahan informasi bagi penelitian yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis akan dibagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka yang berisikan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III Metode penelitian yang berisikan tentang bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

BAB V Simpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Pengertian pembangunan dalam sejarah dan strateginya telah mengalami evolusi perubahan, mulai dari strategi pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan dan kesempatan kerja, pertumbuhan dan pemerataan, penekanan kepada kebutuhan dasar (*basic need approach*), pertumbuhan dan lingkungan hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Perubahan evolutif dari pengertian di atas didasarkan atas banyak kekecewaan dan hasil umpan balik dari pelaksanaan pembangunan yang tidak mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan serta kekurangan informasi dalam memahami persoalan-persoalan yang timbul yang sebelumnya tidak dapat diramalkan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya (Ekaputra, 2009).

Secara garis besar, pembangunan adalah suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan struktur sosial, kelembagaan nasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan yang kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Todaro, 2000). Menurut Todaro (2000), keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu :

1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*).
2. Meningkatkan rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia.

3. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar pola keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi dapat diamati dan dianalisis. Dengan cara tersebut dapat diketahui runtutan peristiwa yang terjadi dan dampaknya pada peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya (Arsyad, 2010).

Dalam proses pembangunan ekonomi, masalah percepatan pertumbuhan ekonomi antar daerah adalah berbeda, sehingga mengakibatkan ketimpangan regional tidak dapat dihindari mengingat adanya perbedaan dalam kekayaan sumber daya yang dimiliki antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Dasar pelaksanaan pembangunan itu sendiri serta konsentrasi kegiatan ekonomi juga berbeda. Menurut Anwar (1996), teori-teori yang menjelaskan tentang pertumbuhan suatu daerah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. *Inward –looking Theories*. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah diakibatkan oleh faktor-faktor ekonomi yang ada di daerah itu sendiri.
2. *Output Oriented Theories*. Teori ini menganggap bahwa adanya mekanisme yang mendasari fenomena pertumbuhan daerah dari satu daerah ke daerah lainnya.

Teori mengenai pembangunan regional dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu :

1. Proses pembangunan wilayah dan ketimpangan antar daerah;
2. Penyebab terjadinya ketimpangan;
3. Alokasi intervensi antar daerah.

Kategori - kategori tersebut bukan suatu pengelompokan yang mutlak tetapi antara yang satu dengan yang lainnya dapat saling melengkapi. Ketimpangan pembangunan antara daerah dengan pusat atau daerah dengan daerah adalah merupakan hal yang wajar. Hal ini disebabkan adanya faktor *endowment* dan awal dari pelaksanaan pembangunan serta investasi. Bagi daerah yang sudah terlebih dahulu membangun tentunya dapat lebih banyak menyediakan sarana dan prasarana, sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi. Proses tersebut menunjukkan ketimpangan pembangunan antar daerah sebenarnya merupakan akibat dari adanya proses pembangunan itu sendiri.

2.2 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya, sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah atau daerah (Arsyad, 1999: 298). Khuldun Munji, mendefinisikan pembangunan daerah sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara terus menerus, berlandaskan kemampuan kemampuan daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

memperhatikan tantangan perkembangan keadaan daerah, nasional, dan global.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa pembangunan daerah secara umum meliputi:

1. Peningkatan keadaan ekonomi untuk mandiri;
2. Peningkatan keadaan sosial daerah untuk kesejahteraan secara adil dan merata;
3. Pengembangan setiap ragam budaya untuk kelestarian;
4. Pemeliharaan keamanan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan kualitas lingkungan;
5. Membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Keadaan daerah, yang meliputi keadaan sosial, politik, budaya, keamanan, fisik daerah dan sarana umum;
2. Rencana pembangunan, yang meliputi tujuan, sasaran, target pembangunan, strategi dan rencana pembangunan;
3. Sarana pembangunan, yang meliputi kelembagaan, dana, sumber daya manusia, dan sumber daya alam yang tersedia;
4. Pengaruh luar, yang meliputi keadaan sosial, politik, ekonomi, keamanan dunia dan kekuatan yang secara khusus mempengaruhi;
5. Pelaksanaan, yang meliputi ketentuan-ketentuan serta pengaturan dan pelaksanaan rencana pembangunan.

2.3 Daerah Tertinggal

2.3.1 Pengertian Daerah Tertinggal

Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2004), daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Dalam konsep Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004), wilayah tertinggal pada umumnya dicirikan dengan letak geografisnya relatif terpencil, atau wilayah - wilayah yang miskin sumberdaya alam, atau rawan bencana alam. Wilayah tertinggal merupakan suatu wilayah dalam suatu daerah yang secara fisik, sosial, dan ekonomi masyarakatnya mencerminkan keterlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan daerah lain. Selanjutnya, wilayah tertinggal dalam kerangka penataan ruang nasional didefinisikan sebagai wilayah budidaya yang secara ekonomi jauh tertinggal dari rata-rata nasional, baik akibat kondisi geografis, maupun kondisi sosial beserta infrastrukturnya.

Menurut Bappenas (2004), pengertian yang lebih umum menyebutkan bahwa wilayah tertinggal merupakan wilayah pedesaan yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, dan keterbatasan aksesibilitasnya ke pusat-pusat pemukiman lainnya. Hal inilah yang menyebabkan kemiskinan serta kondisinya relatif tertinggal dari pedesaan lainnya dalam mengikuti dan memanfaatkan hasil pembangunan nasional dan daerah. Pada hakekatnya pelaksanaan program pembangunan daerah tertinggal sering menghadapi persoalan yaitu adanya tumpang tindih kegiatan dengan program penanggulangan kemiskinan. Secara umum, memang beberapa kegiatan program pembangunan daerah tertinggal pada dasarnya sama dengan program

penanggulangan kemiskinan yaitu sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang terisolir, tertinggal, terpencil dan miskin. Namun, dalam program pembangunan wilayah tertinggal targetnya lebih luas mengingat bukan hanya manusia atau masyarakat saja yang perlu dibenahi, melainkan pengembangan aspek spasial yaitu wilayah yang memiliki fungsi tertentu agar wilayah dengan fungsi tertentu atau wilayah tersebut berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Bappenas (2004), wilayah tertinggal secara umum dapat dilihat dan ditentukan berdasarkan letak geografisnya yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu wilayah tertinggal di pedalaman dan wilayah tertinggal di pulau-pulau terpencil, yaitu :

1. Kondisi wilayah tertinggal di pedalaman.
 - a. Kondisi sumberdaya alam sangat rendah (kesuburan tanahnya yang rendah, rawan longsor, rawan banjir, terbatasnya sumberdaya air, daerah dengan topografi yang terjal, tanah berawa – rawa atau gambut).
 - b. Sumberdaya alamnya mempunyai potensi, namun daerah tersebut belum berkembang atau terbelakang. Kondisi geografis pada umumnya di daerah yang tidak terjangkau, sehingga walaupun lokasinya relatif dekat, namun tidak tersedia akses dari wilayah tersebut ke wilayah pusat pertumbuhan. Penguasaan dan penerapan teknologi yang relatif rendah dikarenakan kurangnya pembinaan dan keterbatasan dukungan prasarana teknologi itu sendiri.

- c. Ketersediaan atau keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, air irigasi, kesehatan, pendidikan dan lainnya menyebabkan wilayah tertinggal tersebut makin sulit untuk berkembang.
 - d. Tingginya kesenjangan ekonomi antar daerah (misalnya antara pantai/pesisir dengan pedalaman). Struktur sosial ekonomi masyarakat terbagi dalam beberapa tingkatan misalnya masyarakat tradisional, semi modern dan masyarakat modern.
 - e. Rendahnya akses ke pusat-pusat pertumbuhan lokal misalnya ibukota kecamatan. Biaya transportasi menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai jual komoditi.
 - f. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia, baik aparatur maupun masyarakat.
 - g. Kualitas dan jumlah rumah penduduk belum layak. Sebaran kampung penduduk yang terpencar dan pada daerah dengan topografi berat, menyebabkan daerah tersebut sulit dijangkau.
 - h. Masih belum mengenal uang sebagai alat jual beli barang. Di masyarakat yang sudah mengenal uang, proses pemupukan modal dari masyarakat sendiri belum berlangsung dengan baik.
2. Kondisi wilayah tertinggal di pulau-pulau terpencil
- a. Kondisi masyarakat pulau - pulau kecil di wilayah terpencil masih sangat marjinal, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang mempunyai kepentingan.
 - b. Terdapat 88 pulau kecil yang bertitik dasar dan berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga.

- c. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengolahan, khususnya terhadap pulau - pulau yang terpencil sulit dijangkau dan tidak berpenghuni.
- d. Kondisi pulau di perbatasan umumnya pulau-pulau yang sangat kecil sehingga sangat rentan terhadap kerusakan baik oleh alam maupun akibat kegiatan manusia.
- e. Adat istiadat, budaya dan agama masyarakat pulau-pulau kecil yang spesifik dan pada umumnya bertentangan dengan adat, budaya yang dibawa oleh pendatang atau wisatawan, sehingga akan menghambat proses pembaharuan.

2.3.2 Kriteria Penentuan Daerah Tertinggal

Untuk mengidentifikasi suatu kabupaten mengalami ketertinggalan dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Daerah Tertinggal Secara Nasional. Dalam hal mengidentifikasi masalah ketertinggalan digunakan 6 (enam) kriteria dan 27 (dua puluh tujuh) indikator daerah tertinggal yang meliputi:

1. Kriteria Perekonomian, yang terdiri dari 2 (dua) Indikator yaitu :
 - (a) Persentase penduduk miskin
 - (b) Pengeluaran Per Kapita Penduduk (rupiah).
2. Kriteria Sumber Daya Manusia (SDM), yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator yaitu:
 - (a) Angka Harapan Hidup atau AHH (tahun),
 - (b) Rata-Rata Lama Sekolah atau RLS (tahun)

- (c) Angka Melek Huruf atau AMH (persen).
3. Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah (KKD), yang terdiri hanya 1 (satu) indikator yaitu Kemampuan Keuangan Daerah.
 4. Kriteria Infrastruktur atau Sarana Prasarana, yang terdiri dari 11 (sebelas) Indikator yang digolongkan atas Jalan antar desa melalui darat dan Jalan antar desa bukan melalui darat (jumlah desa) yaitu :
 - a. Jalan antar desa melalui darat terdiri dari indikator antara lain :
 - 1) Jalan aspal atau beton (jumlah desa)
 - 2) Jalan diperkeras (jumlah desa)
 - 3) Jalan tanah (jumlah desa)
 - 4) Jalan lainnya (jumlah desa).
 - b. Jalan antar desa bukan melalui darat (jumlah desa) terdiri dari indikator - indikator :
 - 1) Pasar tanpa bangunan (jumlah desa)
 - 2) Fasilitas kesehatan per 1000 penduduk (unit atau buah)
 - 3) Dokter per 1000 penduduk (orang),
 - 4) Fasilitas pendidikan dasar per 1000 penduduk (unit/buah)
 - 5) Persentase rumahtangga pengguna listrik
 - 6) Persentase rumahtangga pengguna telepon
 - 7) Persentase rumahtangga pengguna air bersih.
 5. Kriteria Aksesibilitas, yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator yaitu :
 - a. Rata-rata jarak ke ibukota kabupaten (kilometer)
 - b. Akses ke pelayanan kesehatan (kilometer)
 - c. Akses ke pelayanan pendidikan dasar (kilometer)

6. Kriteria Karakteristik Daerah, yang terdiri dari 7 (tujuh) Indikator yaitu :
 - a. Gempa bumi (persentase jumlah desa)
 - b. Tanah longsor (persentase jumlah desa)
 - c. Banjir (persentase jumlah desa)
 - d. Bencana lainnya (persentase jumlah desa)
 - e. Kawasan hutan lindung (persentase jumlah desa)
 - f. Berlahan kritis (persentase jumlah desa)
 - g. Desa konflik (persentase jumlah desa).

2.4 Konsep dan Definisi Strategi

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Umar, 2001). Strategi berasal dari kata Latin *strategia* yang artinya kantor dari jenderal, selain itu strategi bisa juga diartikan sebagai seni memperlalat atau memperkerjakan tindakan-tindakan yang berasal dari kata Perancis *strategos*, arti lain dari kata strategi adalah *strategems* atau menuju ke arah sebuah tujuan (Soesilo, 2002).

2.4.1 Perencanaan strategis

Perencanaan strategis pada dasarnya tidak menganut satu proses yang standar dan banyak sekali variasi proses yang ditawarkan oleh pustaka-pustaka tentang perencanaan strategis (serta tergantung juga dengan dengan bidang tempat perencanaan strategis tersebut diaplikasikan). Menurut sejarahnya, perencanaan strategis pertama kali diaplikasikan dibidang militer, kemudian diaplikasikan ke

dunia usaha atau perusahaan. Pada masa berikutnya, tipe perencanaan ini juga aplikasikan ke organisasi nirlaba (*non-profit*) (Djunaedi, 2002). Pemerintah kabupaten termasuk organisasi nir-laba. Seperti halnya dunia usaha, pemerintah kabupaten pun perlu tanggap terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Orientasi dunia usaha lebih menuju ke pencarian keuntungan atau laba, sedangkan pemerintah kabupaten menekankan pada penyediaan layana dengan sejumlah sumber daya yang dimiliki dan dengan motivasi bukan untuk mencari laba. Dunia usaha membuka atau menutup bidang layanannya tergantung pada pasar dan margin keuntungan, sedangkan pemerintah kabupaten tidak boleh menutup suatu bidang layanan yang ditugaskan kepadanya oleh masyarakat (Djunaedi, 2002).

Pemerintah daerah harus mampu mengantisipasi berbagai perubahan baik regional, nasional maupun internasional. Sebagai sebuah organisasi pemerintah daerah di tuntutan untuk dapat bergerak cepat mengikuti perubahan yang terjadi. Untuk itu diperlukan sebuah perencanaan strategis untuk mengikuti perubahan tersebut. Proses perencanaan strategi dimulai dari visi dan misi organisasi yang menghasilkan isu-isu strategis, kemudian mengidentifikasikan dan mengevaluasi faktor internal maupun eksternal. Faktor internal seperti sumber daya strategi, kemudian mengidentifikasikan dan mengevaluasi faktor internal maupun eksternal.

Faktor internal seperti sumber daya, strategi yang telah ada termasuk di dalamnya adalah kinerja organisasi selama ini. Kemudian faktor eksternal adalah faktor-faktor perubahan diluar organisasi. Dari evaluasi ini diharapkan dapat dirumuskan

berbagai alternatif strategi dalam rangka melakukan tindakan tindakan guna mencapai tujuan organisasi (Rahmat, 2009).

2.4.2 Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Stiglitz (1998), menyatakan bahwa strategi pembangunan lebih ambisius dari pada dokumen perencanaan, karena strategi pembangunan menyiapkan strategi bukan hanya untuk akumulasi modal dan penempatan sumber daya, tapi juga strategi untuk transformasi masyarakat. Strategi pembangunan memiliki peran penting sebagai pemercepat terjadinya transformasi masyarakat yang bisa dilakukan dengan mengidentifikasi area keuntungan komparatif negara. Mengidentifikasi area ini dan mempublikasikannya sebagai barang publik adalah tanggung jawab pemerintah. Strategi pembangunan perlu memajukan wacana (*vision*) tentang transformasi, akan seperti apa masyarakat kita 20 tahun mendatang. Wacana ini tentu mengandung tujuan-tujuan kuantitatif, seperti mengurangi kemiskinan (sebanyak setengah) dan memperhatikan pendidikan, namun hal tersebut merupakan elemen-elemen atau target dalam proses transformasi, bukan wacana dari transformasi itu sendiri. Strategi pembangunan kadang dilihat sebagai *blueprint*, sebuah peta yang menggambarkan kemana masyarakat akan menuju.

Dalam membuat strategi kebijakan perlu diperhatikan beberapa aspek, diantaranya menetapkan prioritas, koordinasi, dan *consensus builders*. Semua masyarakat memiliki keterbatasan sumber daya; apalagi bagi masyarakat pada negara miskin. Di atas keterbatasan sumber daya yang dimiliki masyarakat adalah keterbatasan kemampuan (*capacity*) pemerintah, oleh karena itu, strategi pembangunan perlu

menetapkan prioritas. Kunci utama dari prioritas adalah kesadaran akan tahapan: hal apa yang perlu dikerjakan terlebih dahulu sebelum hal yang lain (Stiglitz, 1998). Menurut Arsyad (1999), strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu :

1. Strategi pengembangan fisik atau lokalitas (*locality or physical development strategy*)
2. Strategi pengembangan dunia usaha (*bussiness development strategy*)
3. Strategi pengembangan sumber daya manusia (*human resource development strategy*)
4. Strategi pengembangan masyarakat (*community based development strategy*).

Strategi pengembangan fisik atau lokal ini ditujukan untuk menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona (*amenity bases*) atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki daya tarik daerah atau kota dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. Sedangkan strategi pengembangan daerah antara lain melalui penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha dengan pengaturan dan kebijakan yang memberi kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan kualitas lingkungan. Strategi pengembangan sumberdaya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam pembangunan ekonomi.

Pengembangan kualitas sumberdaya manusia ini antara lain dapat dilakukan dengan pelatihan dengan sistem *costumized trainning* atau pelatihan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pemberi kerja. Sementara itu strategi pengembangan ekonomi masyarakat merupakan kegiatan

yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok tertentu disuatu daerah. Kegiatan tersebut juga sering disebut dengan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial, misalnya dengan menciptakan proyek - proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau memperoleh keuntungan usahanya (Arsyad, 1999).

2.5 Analisis SWOT

Menurut Soesilo (2002), analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan, sebuah organisasi harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan penelitian ini dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Menurut Soesilo (2002), analisis SWOT memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

1. Tidak hanya dapat membuat ekstrapolasi masa depan, analisis SWOT dapat dipakai untuk membuat masa depan;
2. Bersifat multiguna dan sederhana;
3. Cocok dengan tehnik lain, antara lain Delphi, Brainstroming, time series, regression (ekonometri), dan AHP;
4. Dapat dipakai membangun untuk konsensus berdasarkan kebutuhan dan keinginan.

Menurut Nining (2002), kritik terhadap manajemen strategi di sektor publik pada analisa SWOT yang merupakan langkah utama dalam manajemen stratejik pada mulanya berkembang pada manajemen swasta. Pemakaiannya dalam manajemen pembangunan adalah suatu fenomena yang relatif baru yang dapat dikatakan sebagai suatu hasil atau proses reformasi administrasi publik. Selanjutnya Nining (2002), menyebutkan bahwa terdapat kritik terhadap manajemen strategik di sektor publik diantaranya:

1. Terlalu berbasis ekonomi seperti manajemen swasta, sehingga sering lupa pada tanggung jawab non ekonomis misalnya tanggung jawab sosial.
2. Mengambil dasar-dasar dari manajemen swasta.
3. Dapat dikatakan sebagai pendekatan Neo Taylor yang intinya adalah mengabaikan tingkah laku orang karena dianggap hanya ada satu cara yang benar (*one best way*) dan ini dilakukan untuk memudahkan pengontrolan.
4. Terlalu sibuk berpolitik dan mementingkan upaya personal.
5. Pertanggung jawaban publik menjadi berkurang karena sering hanya mengejar indikator kinerja yang kumulatif.
6. Memiliki problem besar dalam implementasi karena sifatnya sudah dipatok sehingga lebih kaku.
7. Terlalu sempit dalam menangani masalah publik yang sebetulnya amat bervariasi sesuai masalah yang ditanganinya.
8. Terlalu disederhanakan sekali yaitu hanya dengan berpedoman pada indikator kinerja. Padahal seharusnya hal ini bukan yang generik tetapi harus disesuaikan dengan sektor.

Pendapat lain dikemukakan Salusu (1996:372) bahwa usaha untuk menganalisis SWOT pada organisasi publik mungkin tidak selancar dengan apa yang dilakukan pada organisasi bisnis. Pengambilan keputusan strategik pada kebanyakan organisasi publik umumnya terjadi dalam kondisi ambiguitas kebijaksanaan. Dalam kondisi tersebut, kebijaksanaan tidak dirumuskan dengan tajam sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda bagi masing-masing orang. Akibatnya, setiap orang yang bertugas mengimplementasikan kebijaksanaan itu, tidak memperoteh petunjuk yang jelas bagaimana seharusnya kebijaksanaan itu diterapkan. Selanjutnya Salusu (1996) menyebutkan, kondisi lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan strategik adalah peluang untuk berperan serta terbuka amat luas sehingga sulit membuat rumusan yang memuaskan semua pihak.

Peran serta berupa masukan dan pengaruh dan berbagai media, golongan politisi, dan dari bermacam- macam kelompok dan koalisi kepentingan yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Peran serta yang luas ini sering kali menghambat upaya pengambilan keputusan yang mendesak, atau sebaliknya keputusan yang dibuat terpaksa harus mengandung banyak kelemahan. Belum lagi kalau ada pergantian pejabat secara periodik, tanpa disadari kadang-kadang menciptakan kekosongan waktu yang artifisial. Keadaan ini juga menghambat pengambilan keputusan stratejik.

2.6 Analytical Hierarchy Process (AHP)

Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan yang pada dasarnya berusaha menutupi kekurangan dari model

pengambilan keputusan yang lainnya. Alat utama dalam model AHP ini adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya berupa persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dan tidak terukur dipecah ke dalam kelompok - kelompoknya dan kemudian kelompok - kelompok tersebut diatur menjadi sebuah bentuk hirarki (Brojonegoro, 1992). *Analytical Hierarchy Process* memberikan kemungkinan bagi para pembuat keputusan untuk merepresentasikan interaksi faktor-faktor yang berkesinambungan di dalam situasi yang kompleks dan tidak terstruktur. Alat analisis ini membantu para pembuat keputusan untuk mengidentifikasi dan sekaligus membuat prioritas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, pengetahuan yang dimiliki, dan pengalaman yang mereka miliki untuk masing-masing masalah yang dihadapi (Saaty, 2000).

Menurut Brojonegoro (1992), dalam melakukan analisis dengan menggunakan AHP terdapat 4 aksioma yang harus diperhatikan, yaitu aksioma resiprokal (*reciprocal comparison*), aksioma homogenitas (*homogeneity*), aksioma ketergantungan (*independence*), dan aksioma ekspektasi (*expectation*). Aksioma-aksioma tersebut dapat dijelaskan secara ringkas dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Aksioma-aksioma dalam Analytical Hierarchy Process (AHP)

No	Aksioma	Keterangan
1	<i>Reciprocal Comparison</i>	Pengambil keputusan bisa membuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. Kalau A disukai dari B dengan skala x kali, maka B lebih disukai dari A dengan skala 1/x kali. Jadi $A_{ij} = 1/A_{ji}$.
2	<i>Homogeneity</i>	Preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas, elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lainnya.
3	<i>Independence</i>	Kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada, tapi alternatif dipengaruhi oleh kriteria.
4	<i>Expectation</i>	Struktur hirarki diasumsikan lengkap. Ekspektasi dan persepsi manusia lebih menonjol daripada rasionalitas.

Sumber: Mahi (1991) dan Brojonegoro (1992)

Tabel 2.1 diatas dapat diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

1. Aksioma Resiprokal (*Reciprocal Comparison*): matriks perbandingan berpasangan yang terbentuk haruslah bersifat kebalikan. Artinya harus bisa dibuat perbandingan dan dinyatakan preferensinya, dimana preferensi tersebut harus memenuhi syarat resiprokal, yaitu kalau A lebih disukai daripada B dengan skala x , maka B lebih disukai daripada A dengan skala $1/x$.
2. Aksioma Homogenitas (*Homogeneity*): aksioma ini memiliki arti bahwa preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas, atau dengan kata lain elemen-elemennya dapat diperbandingkan satu sama lain. Apabila aksioma ini tidak terpenuhi, maka elemen-elemen yang diperbandingkan tersebut tidak homogen, dan harus dibentuk suatu “cluster” (kelompok elemen-elemen) yang baru.
3. Aksioma Ketergantungan (*Independence*): preferensi harus dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada, melainkan oleh obyektif secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa pola ketergantungan atau pengaruh dalam model AHP adalah searah ke atas. Artinya perbandingan antara elemen-elemen dalam satu level dipengaruhi atau tergantung oleh elemen-elemen dalam level di atasnya.
4. Aksioma Ekspektasi (*Expectations*): dalam proses AHP yang dituntut bukanlah rasionalitas, tapi yang menonjol adalah ekspektasi dan persepsi manusia. Dalam kaitan ini penilaian yang irasional dapat diterima, asalkan konsisten. Untuk tujuan pengambilan keputusan struktur hirarki diasumsikan lengkap, apabila asumsi ini tidak dipenuhi maka pengambil keputusan tidak

memakai seluruh kriteria dan atau obyektif yang tersedia atau diperlukan sehingga keputusan yang diambil dianggap tidak lengkap (berbagai sumber).

2.6.1 Prinsip Penyusunan Hirarki

Dalam proses penyusunan model AHP, terdapat 2 tahapan yang utama, yaitu :

1. Penyusunan Hirarki (Dekomposisi)
2. Evaluasi Hirarki

Penyusunan hirarki atau dekomposisi mencakup 3 proses berurutan yang merupakan proses iterasi :

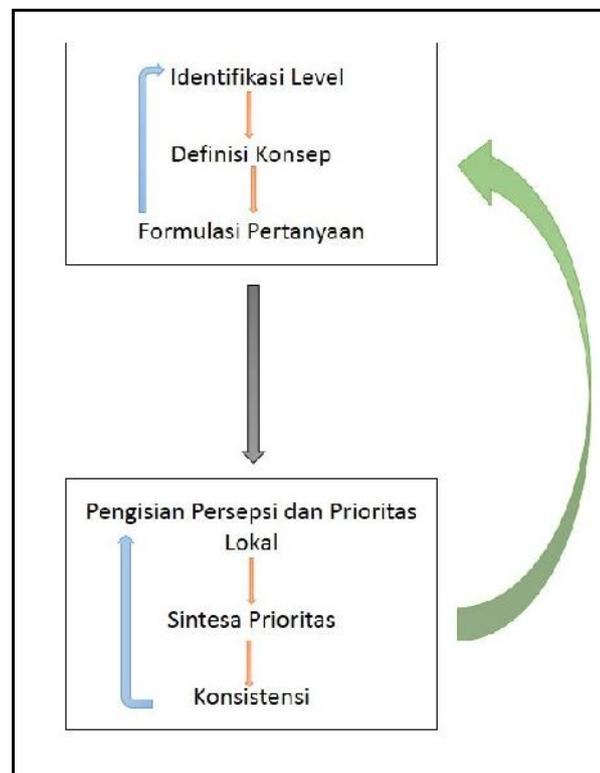
- (a) identifikasi level dan elemen
- (b) definisi konsep
- (c) formulasi pertanyaan.

Proses penyusunan hirarki secara praktis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi tujuan keseluruhan pembuatan hirarki atau yang lazim disebut '*goal*', yang disebutkan disini adalah masalah yang akan dicari pemecahannya lewat model AHP.
2. Menentukan kriteria-kriteria yang diperlukan atau sesuai dengan tujuan keseluruhan tersebut. Kriteria ini biasanya terdiri dari syarat-syarat atau keadaan yang kiranya dapat menunjang tercapainya sebuah '*goal*' dan biasanya masih bersifat umum (*general*). Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu dipertimbangkan kemungkinan penambahan sub-sub kriteria di bawah setiap kriteria. Subkriteria merupakan penjabaran lebih dari kriteria yang masih bersifat umum tersebut dan hal ini biasanya diperlukan bagi para pengambil keputusan yang menyukai hal - hal yang lebih detail.

3. Identifikasikan alternatif - alternatif yang akan dievaluasi di bawah sub-sub kriteria. Kalau subkriteria-subkriteria yang ada dirasakan terlalu luas maka perlu ditambahkan sebuah level di atas alternatif-alternatif yang mengidentifikasi atribut-atribut dari alternatif-alternatif tersebut dalam proses evaluasi (Brojonegoro, 1992).

Variasi pembuatan hirarki ini terus berkembang dengan semakin kompleksnya permasalahan yang ada di dunia, sehingga tidak ada bentuk hirarki yang baku untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.



Sumber: Brojonegoro (1992)

Gambar 2.1 Penyusunan Hirarki

Berdasarkan Gambar 2.1 diatas, langkah pengujian konsistensi sering dipisahkan dari evaluasi hirarki tetapi penulis berpendapat bahwa langkah tersebut akan sangat mempengaruhi prioritas. Proses penyusunan hirarki sebenarnya merupakan

proses iterasi dimana konsep - konsep, pertanyaan - pertanyaan dan jawaban - jawabannya menentukan elemen dan level dari suatu hirarki. Ketidakjelasan atau kesalahan dalam proses menjawab pertanyaan akan membuat para pengambil keputusan memilih kriteria atau alternatif yang salah, oleh karena itu semua pertanyaan seharusnya dijawab dan konsisten dengan informasi yang ada. Proses dekomposisi merupakan langkah terpenting dalam penyusunan model AHP, karena dari langkah inilah sebuah validitas dan kemampuan model dapat diuji. Revisi pendapat, dapat dilakukan apabila nilai rasio inkonsistensi pendapat cukup tinggi ($>0,1$). Beberapa ahli berpendapat jika jumlah revisi terlalu besar, sebaiknya responden tersebut dihilangkan. Jadi penggunaan revisi ini sangat terbatas mengingat akan terjadinya penyimpangan dari jawaban yang sebenarnya. (Brojonegoro, 1992).

Tabel 2.2 Proses Penyusunan Hirarki

Tahapan	Proses
Tahap Pertama	Identifikasi tujuan keseluruhan pembuatan hirarki yang biasa disebut dengan Goal (tujuan), yaitu masalah yang akan dicari pemecahannya melalui model AHP.
Tahap Kedua	Menentukan kriteria yang diperlukan untuk mendukung tujuan keseluruhan.
Tahap Ketiga	Identifikasi strategi-alternatif yang akan dievaluasi dibawah kriteria.

Sumber: Brojonegoro (1992)

2.6.2 Prinsip Menetapkan Prioritas

Setelah proses penyusunan hirarki, proses berikutnya adalah proses menetapkan kriteria. Proses ini merupakan proses yang penting dalam penggunaan model AHP, dimana dalam proses ini dilakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) antar berbagai kriteria yang telah ditetapkan, yang dilakukan dengan

tahapan sebagai berikut: Menentukan mana diantara dua yang dianggap penting atau disukai atau mungkin terjadi; Menentukan berapa kali lebih penting atau disukai atau mungkin terjadi. Seluruh prioritas yang ada dibandingkan satu sama lain secara berpasangan dan diberi bobot berupa skala dari 1 sampai dengan 9. Setelah hirarki dapat tersusun, selanjutnya dilakukan pengisian persepsi ahli dengan cara membandingkan antara elemen-elemen di dalam satu level dengan tetap memperhatikan pengaruh pada level di atasnya.

Tabel 2.3 Skala Perbandingan Secara Berpasangan

Skala	Artinya	Keterangan
1	Kedua elemen sama pentingnya (<i>equal importance</i>)	Kedua elemen yang diperbandingkan memberikan kontribusi yang sama besar untuk mencapai tujuan.
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen yang lainnya (<i>moderate importance</i>)	Pengalaman dan penilaian agak sedikit menyukai sebuah elemen daripada elemen lainnya.
5	Elemen yang satu lebih penting Dari Elemen yang lainnya (<i>essential/ strong importance</i>)	Pengalaman dan penilaian lebih kuat menyukai sebuah elemen daripada elemen lainnya.
7	Elemen yang satu sangat lebih penting dari elemen yang lainnya (<i>very strong importance</i>)	Sebuah elemen sangat lebih disukai daripada elemen yang lainnya, dominasinya terlihat nyata dalam keadaan yang sebenarnya
9	Elemen yang satu mutlak lebih penting dari elemen yang lainnya (<i>extreme importance</i>)	Sebuah elemen mutlak lebih kuat disukai dari yang lainnya dan berada pada tingkat tertinggi.
2,4,6,8	Merupakan angka kompromi diantara penilaian diatas	Bila kompromi diperlukan diantara dua pertimbangan/penilaian.

Sumber: Saaty (1986)

Setelah hirarki dapat tersusun selanjutnya dilakukan pengisian persepsi ahli dengan cara membandingkan antara elemen-elemen di dalam satu level dengan tetap memperhatikan pengaruh pada level di atasnya.

2.6.3 Kelebihan dan Kelemahan AHP

Menurut Saaty (1993), kelebihan dari metode AHP dalam pemecahan persoalan dan pengambilan keputusan adalah:

1. Kesatuan

AHP memberi satu model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk aneka ragam persoalan tak terstruktur.

2. Kompleksitas

AHP memadukan rancangan deduktif' dan rancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan kompleks.

3. Saling ketergantungan

AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam suatu sistem dan tidak memaksakan pemikiran linier.

4. Penyusunan hirarki

AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat.

5. Pengukuran

AHP memberi suatu skala untuk mengukur hal-hal dan wujud suatu model untuk menetapkan prioritas.

6. Konsistensi

AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menentukan prioritas.

7. Sintesis

AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap

alternatif.

8. Tawar-menawar

AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka.

9. Penilaian dan konsensus

AHP tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesis suatu hasil yang representatif dari berbagai penilaian yang berbeda-beda.

10. Pengulangan proses

AHP memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan.

Di samping kelebihan-kelebihan di atas, terdapat pula beberapa kesulitan dalam menerapkan metode AHP ini. Apabila kesulitan-kesulitan tersebut tidak dapat diatasi, maka dapat menjadi kelemahan dari metode AHP dalam pengambilan keputusan. Kesulitan-kesulitan dalam menerapkan metode ini ialah:

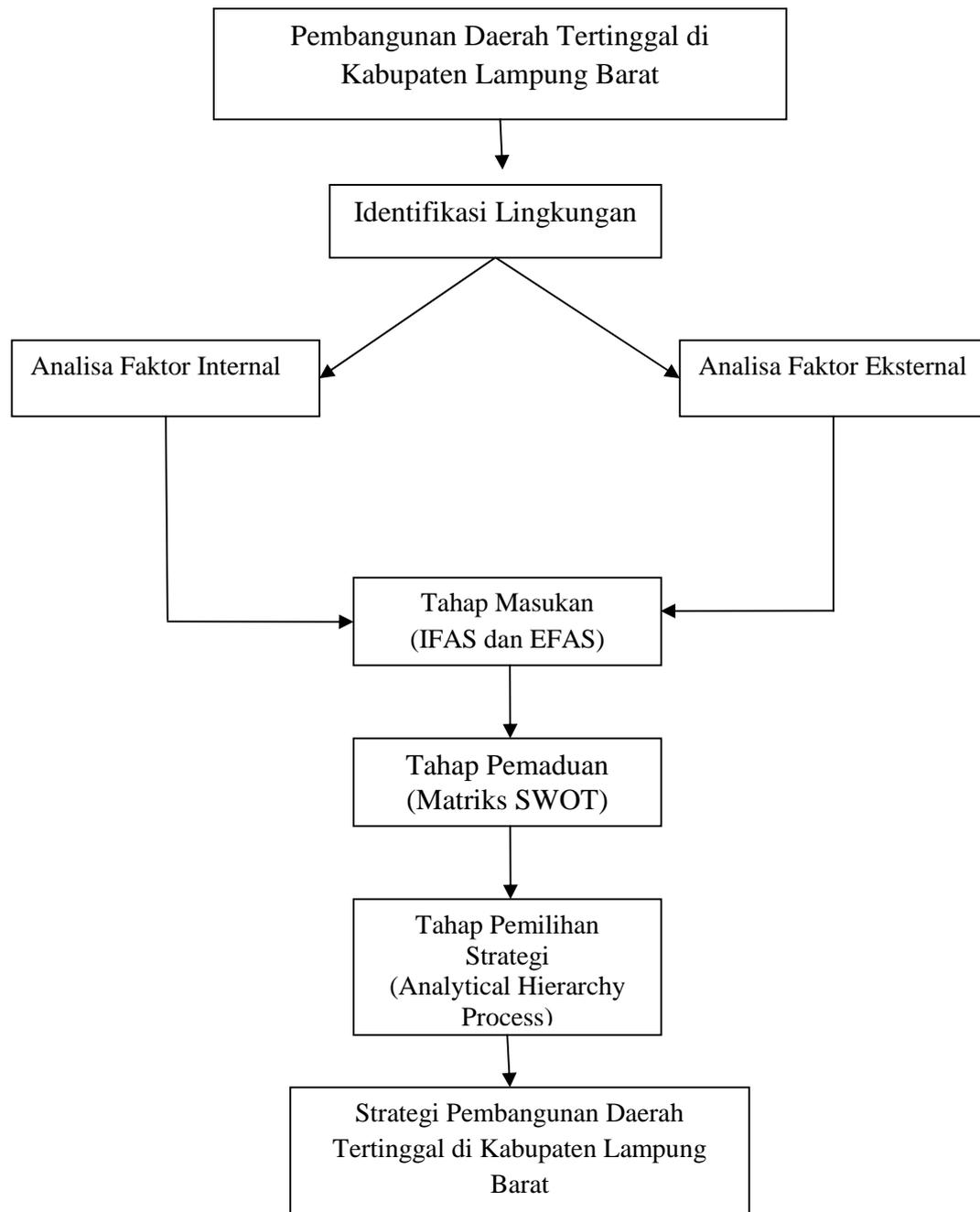
1. AHP tidak dapat diterapkan pada suatu perbedaan sudut pandang yang sangat tajam/ekstrim di kalangan responden.
2. Metode ini mensyaratkan ketergantungan pada sekelompok ahli sesuai dengan jenis spesialis terkait dalam pengambilan keputusan.
3. Responden yang dilibatkan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang permasalahan serta metode AHP.

2.7 Kerangka Pemikiran

Diperlukan suatu kajian yang menyeluruh dan mendalam tentang prospek pengembangan di Kabupaten Lampung Barat, sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, kemauan masyarakat dan kepentingan semua *stakeholders*, supaya berkelanjutan. Pendekatan kerangka pikir penelitian diarahkan pada strategi pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Lampung Barat. Dalam penelitian ini disusun perumusan strategi dengan melalui tiga tahap yakni tahap masukan, tahap pemaduan, tahap keputusan. Kajian ini diawali dengan menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal. Hasil analisis internal menghasilkan *Strength* dan *Weakness* dan analisis eksternal menghasilkan *Opportunity* dan *Threats* dalam bentuk *Internal Factor Analysis System (IFAS)* dan *External Factor Analysis System (EFAS)*. Setelah melalui tahapan kerja *Internal Factor Analysis System (IFAS)* dan *External Factor Analysis System (EFAS)* maka akan diperoleh nilai rata-rata skor total bagi wilayah yang dinilai. Hasil dari identifikasi matriks ini digunakan untuk menyusun suatu matriks *Strength - Weakness – Opportunity - Threats (SWOT)* yang akan menghasilkan berbagai alternatif strategi.

Hasil dari matriks SWOT kemudian dianalisis lagi dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Pada tahap akhir *Analytic Hierarchy Process (AHP)* sebagai bentuk model pengambilan keputusan yang pada dasarnya berusaha menutupi kekurangan dari model pengambilan keputusan yang lainnya. Alat utama dalam model AHP ini adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya berupa persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dan tidak terukur dipecah ke dalam kelompok - kelompoknya dan kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi sebuah bentuk hirarki (Brojonegoro,

1992). AHP dipilih karena AHP dapat membantu menentukan pilihan terbaik yang melibatkan banyak kriteria berdasarkan intuisi dan persepsi para ahli dengan tetap memperhatikan konsistensi. Sehingga akan didapatkan strategi terbaik dari pembangunan wilayah di masa yang akan datang. Kerangka Pemikiran kajian ini tersaji dalam Gambar 2.2



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang bertemakan tentang strategi pembangunan telah banyak dilakukan oleh para ahli ekonomi. Penelitian terdahulu bertujuan membandingkan dan memperkuat atas hasil analisis yang dilakukan yang merujuk dari beberapa studi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

Nama	Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Asri Dwi Asmarani (2010)	Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Kab. Klaten: Pendekatan Analisis SWOT dan AHP.	Pendekatan SWOT dan AHP.	Sasaran pembangunan yang harus diprioritaskan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan cara memperkuat perekonomian mikro.
Endah Djuwendah (2013)	Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal di Kabupaten Garut	Teknik analisis menggunakan indeks produktivitas relatif (IPR) dan analisis SWOT	Strategi utama untuk pengembangan daerah tertinggal di wilayah Garut Selatan yaitu dengan cara memadukan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang berbasis potensi sumberdaya lokal.
Donal Hutasoit (2005)	Strategi Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Rangka Mengurangi Laju Kerusakan Hutan: Suatu Pendekatan Analisis SWOT dan AHP.	Pendekatan SWOT dan AHP.	Dilakukan pemilihan prioritas strategi yaitu: Peningkatan jumlah SDM BTNKS dan kemampuan petugas dalam mengantisipasi gangguan kawasan terhadap aktifitas pemenuhan bahan baku industri secara illegal, dukungan dana operasional yang memadai dan teratur dan peningkatan organisasi/ kelembagaan.
Alfian Zulkarnain (2013)	Strategi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Belitung	Pendekatan SWOT dan AHP.	Alternatif kebijakan yang menjadi prioritas adalah optimalisasi destinasi dan atraksi wisata yang sudah ada dengan bobot prioritas sebesar 35,5%.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Nama	Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Apriana Susaei (2011)	Evaluasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Di Kabupaten Barru	Pendekatan AHP.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan P2KPDT di Kabupaten Barru lebih menonjol pada sisi peningkatan kandungan lokal, hal tersebut ditunjukkan dengan bobot prioritas tertinggi dalam analisis (0,337) dibanding dengan 6 fokus pelaksanaan kegiatan yang lain.
Emirhadi Suganda (2008)	Pendekatan SWOT dan AHP pada Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Pesisir (Kasus: Pulomerak-Bojonegara)	Pendekatan SWOT dan AHP.	Hipotesis yang diambil dalam penelitian adalah : Pembangunan kawasan perkotaan pesisir akan berkelanjutan jika mengintegrasikan penataan ruang kawasan darat dan laut, setelah dilakukan uji dan analisis, ternyata hipotesis yang diajukan terbukti benar.
Ovi Resia Arianti Putri dan Eko Budi Santoso (2012)	Pengembangan Daerah Tertinggal (Underdevelopment Region) Di Kabupaten Sampang	Menggunakan alat Analisis yaitu analisis <i>cluster</i> guna memperoleh tipologi daerah tertinggal, dan analisis AHP yang digunakan untuk menentukan program-program prioritas pengembangan daerah tertinggal.	Diperoleh program-prioritas pengembangan daerah tertinggal yaitu program terkait dengan infrastruktur sebagai prioritas pertama, ekonomi, serta sumberdaya manusia.
Taufik Zainal Abidin (2012)	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Sektor Potensial Di Kabupaten Asahan (Pendekatan Model Basis Ekonomi Dan SWOT)	Pendekatan model basis ekonomi dan SWOT	Hasil penelitian ini yaitu : a. Kabupaten Asahan mempunyai tiga sektor unggulan yaitu sektor pertanian, sektor industri dan sektor listrik gas dan air. b. Sub-sektor pertanian khususnya tanaman perkebunan yang mempunyai LQ lebih besar

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu (lanjutan)

Nama	Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Almasdi Syahza dan Suarman (2013)	Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam. Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan	Metode Rapid Rural Appraisal (RRA)	<p>dari 1 atau sub-sektor yang menjadi komoditi unggulan dimana LQ rata-rata perperiode sebesar 1,78, yang berarti 78% hasil perkebunan di ekspor ke luar daerah.</p> <p>c. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi Sumatera utara untuk semua sektor (nasional share) sebesar Rp 1.129.779.89 juta.</p> <p>d. Kabupaten Asahan mempunyai keterkaitan ekonomi antar daerah yang sangat kuat (sangat signifikan) terhadap Kabupaten Simalungun dan Kota Tanjung Balai.</p> <p>Dalam upaya memacu pembangunan dari sisi aspek ekonomi dan sosial di daerah tertinggal, maka program pembangunan pedesaan. Harus memprioritaskan tiga aspek utama, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Ekonomi Rakyat . b. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia; c. Pembangunan Infrastruktur.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Daerah penelitian adalah kabupaten tertinggal di provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Pemilihan daerah penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling* atau memilih sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu :

1. Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah tertinggal menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.
2. Masih banyaknya potensi ekonomi, khususnya sumberdaya lokal yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat.

Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2018.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dimana dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Tujuan melakukan wawancara adalah memungkinkan kita untuk masuk dalam perspektif orang lain. Adalah tanggung jawab pewawancara menyediakan kerangka kerja, yang orang

dapat menanggapi dengan rasa nyaman, tepat dan jujur terhadap pertanyaan terbuka (Patton, 2009). Wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka dan wawancara dengan responden terpilih (*Purposive Sampling*) berdasarkan kemampuan dan keterlibatannya dengan masalah yang diteliti baik secara internal maupun eksternal untuk mendapatkan masukan pada indikator strategi SWOT dan AHP yang akan diteliti.

3.2.2 Dokumentasi

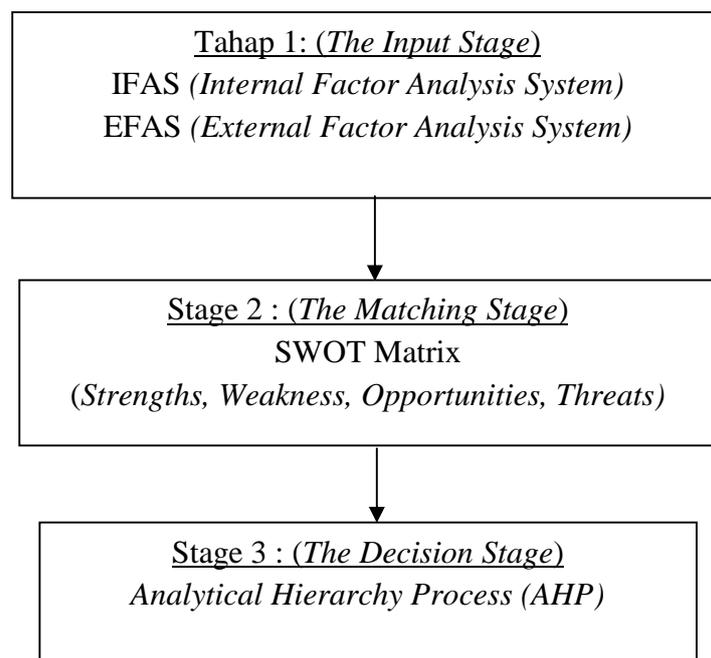
Penggunaan dokumen resmi dalam penelitian sebagai sumber data telah lama digunakan sebagai alat untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan tentang suatu keadaan. Pengumpulan data dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari kegiatan wawancara. Dokumen-dokumen tersebut berasal dari Bappeda Kabupaten Lampung Barat dan BPS Kabupaten Lampung Barat.

3.2.3 Survey

Survey merupakan satu tahapan untuk mencari informasi dari responden. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengambilan data pokok dimana pada umumnya yang merupakan unit analisa dalam penelitian survei adalah responden kunci. Kuesioner di buat sedemikian rupa dengan berbagai alternatif jawaban dan responden memberikan tanda pada satu jawaban saja. Penyampaian kuesioner kepada responden dilakukan secara langsung dan sebelumnya diberi pengarahan mengenai tata cara pengisian kuesioner. Setelah diisi oleh responden, kemudian dikembalikan kepada peneliti.

3.3 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode analisis, yaitu metode deskriptif dan metode kuantitatif. Untuk menyusun strategi dilakukan dengan melalui tiga tahap analisis, yakni tahap masukan, tahap penggabungan, tahap keputusan. Tahap akhir analisis kasus adalah memformulasikan keputusan yang akan diambil. Kerangka analisa penyusun strategi tertera pada Gambar 3.1



Gambar 3.1 Kerangka Formulasi Strategi

3.3.1 Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*)

Konsep analisis SWOT memberikan suatu pandangan dasar tentang strategi atau taktik yang diperlukan dalam mencapai tujuan tertentu. Analisis SWOT mengkaji dengan menilai faktor-faktor terkait. Untuk perumusan strategi dan mengelompokkan faktor-faktor tersebut menjadi faktor eksternal dan faktor internal, kemudian membandingkan antara faktor eksternal yang merupakan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal yang berupa

kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) (Rangkuti, 2001). Tahapan-tahapan dalam melakukan analisis SWOT dilakukan sebagai berikut:

3.3.1.1 Identifikasi Faktor-Faktor Internal dan Eksternal

Tahap pertama dalam analisis SWOT adalah melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Pada tahap ini dimulai dengan melakukan *survey* identifikasi terhadap indikasi kekuatan, kelemahan, peluang yang ada dan ancaman yang dihadapi. Identifikasi dirumuskan melalui berbagai sumber literatur kepustakaan, hasil penelitian terdahulu, dan juga wawancara langsung dengan responden.

3.3.1.2 Penyusunan Kuisisioner

Setelah faktor-faktor internal dan eksternal telah teridentifikasi, kemudian disusun kuisisioner berdasarkan data-data yang terkumpul, bahan bacaan, dan dokumentasi-dokumentasi yang didapat dari penelitian. Penilaian terhadap faktor-faktor yang telah diidentifikasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Penilaian terhadap prestasi faktor. Penilaian pada tahap ini diberikan skala antara 1 sampai dengan 9, yang mempunyai arti sebagai berikut:

Tabel 3.1 Penilaian Terhadap Prestasi Faktor

Skor	Arti	Skor	Arti
1.	Amat Sangat Buruk	6.	Sedikit Baik
2.	Sangat Buruk	7.	Baik
3.	Buruk	8.	Sangat Baik
4.	Sedikit Buruk	9.	Amat Sangat Baik
5.	Sedang atau Netral		

- b. Penilaian urgensi (tingkat kepentingan) terhadap penanganan faktor-faktor. Penilaian pada tahap ini diberikan skala a sampai dengan d, yang mempunyai arti sebagai berikut:

Tabel 3.2. Penilaian Urgensi

Skala	Arti
a	Sangat penting untuk dilakukan penanganan
b	Penting untuk dilakukan penanganan
c	Kurang penting untuk dilakukan penanganan
d	Tidak penting untuk melakukan penanganan

3.3.1.3 Penentuan Responden

Setelah kuisisioner selesai disusun, maka tahap berikutnya adalah penentuan responden yang akan mengisi kuisisioner tersebut. Penentuan responden dilakukan dengan mempertimbangkan keahlian dan keterkaitan calon responden dengan permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan responden ditetapkan secara *purposive*, atau ditetapkan langsung berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Adapun responden yang diminta melakukan penilaian faktor-faktor internal dan eksternal dalam kuisisioner SWOT adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3. Daftar Responden Kuisisioner SWOT

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Pendidikan
1	Responden 1	Sekretaris	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lampung Barat	S1
2	Responden 2	Anggota DPRD Lampung Barat		S1
3	Responden 3	Kepala Dinas	Dinas Perkebunan Lampung Barat	S2
4	Responden 4	Kasi Peningkatan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat	S2
5	Responden 5	Pengusaha Kopi	Pengusaha Kopi Ratu Luwak	SMU
6	Responden 6	Tokoh Masyarakat		S1
7	Responden 7	Kasubbid kedaruratan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat	S1
8	Responden 8	Kasi Bina Usaha Tani Tanaman Pangan	Dinas Pertanian Lampung Barat	S1
9	Responden 9	Sekretaris	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	S1
10	Responden 10	Kabid Fisik	Bappeda Kabupaten Lampung Barat	S2
11	Responden 11	Sekretaris	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	S2

Tabel 3.3. Daftar Responden Kuisisioner SWOT (Lanjutan)

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Pendidikan
12	Responden 12	Dosen Tetap FEB Unila Kepala UPT PKK UNILA	Universitas Lampung	S3
13	Responden 13	Sekretaris	Bappeda Kabupaten Lampung Barat	S2

3.3.1.4 Analisis Data

Setelah pengisian kuisisioner, maka akan didapatkan penilaian atas faktor- faktor internal dan eksternal yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, sehingga kemudian akan didapatkan tabel indikator faktor-faktor internal dan eksternal. Dari penilaian terhadap faktor-faktor internal dan eksternal, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi unsur-unsur yang dikategorikan sebagai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan dan peluang (*opportunity*) yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat.

Menurut Rangkuti (1997), Setelah faktor-faktor internal dikelompokkan menjadi kekuatan dan kelemahan, dan faktor-faktor eksternal dikelompokkan menjadi peluang dan ancaman, langkah selanjutnya adalah melakukan pembobotan IFAS – EFAS (*Internal Factor Analysis System-External Factor Analysis System*) elemen-elemen SWOT dengan cara sebagai berikut:

1. Setiap nilai rata-rata horizontal dikurangi nilai 5 (lima) sebagai nilai dari persepsi/pendapat responden yang lebih adil atas pembagian faktor internal menjadi *strength* dan *weakness*, dan faktor eksternal menjadi *opportunity* dan *threat*. Nilai 5 (lima) diambil sebagai patokan (*benchmark*) yang berkorelasi netral terhadap sasaran. Nilai yang dihasilkan kemudian disebut sebagai

penyesuaian nilai rata-rata;

2. Nilai penyesuaian bersifat nilai mutlak;
3. Penentuan bobot dari masing-masing elemen SWOT untuk setiap faktornya dengan mengambil bobot masing-masing faktor = 100%. Bobot total dari setiap elemen SWOT menggambarkan total nilai penyesuaian rata-rata terhadap nilai total faktornya masing-masing;
4. Pembobotan yang dipakai sebagai bahan penilaian prioritas adalah bobot tertimbang yang diperoleh dari perkalian antara bobot x rating. Rating diperoleh dari nilai urgensi penanganan/skala prioritas kepentingan, sesuai dengan urutan level: huruf a = 4; b = 3; c = 2; d = 1.

3.3.1.5 Perumusan Strategi

Untuk mendapatkan prioritas dan keterkaitan antar strategi, maka dari hasil pembobotan IFAS-EFAS (*Internal Factor Analysis System - External Factor Analysis System*) kuisioner SWOT untuk masing-masing indikator tersebut, dilakukan interaksi kombinasi dari strategi yang meliputi kombinasi internal-eksternal, yang terdiri dari:

1. Strategi *Strength-Opportunity* (SO); Interaksi kombinasi strategi SO: yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi *Strength-Threat* (ST); Interaksi kombinasi strategi ST: yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman;
3. Strategi *Weakness-Opportunity* (WO); Interaksi kombinasi strategi WO: yaitu suatu strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
4. Strategi *Weakness-Threat* (WT) Interaksi kombinasi strategi WT: yaitu suatu strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman.

Tabel 3.4. Matriks Faktor Internal dan Eksternal

		FAKTOR EKSTERNAL	
		OPPORTUNITY (O)	THREAT (T)
FAKTOR INTERNAL	STRENGTH (S)	Strategi SO	Strategi ST
	WEAKNESS (W)	Strategi WO	Strategi WT

Sumber: Nining I. Soesilo, 2002

Dari matriks tersebut akan diperoleh 4 pilihan strategi yang dapat diambil oleh *decision maker* sebagai strategi pilihan yang tentu saja ditentukan setelah mempertimbangkan potensi, kondisi dan kendala yang ada. Kemudian dari interaksi strategi tersebut akan didapatkan Matriks SWOT – Interaksi IFAS – EFAS (*Internal Factor Analysis System - External Factor Analysis System*) seperti yang dijelaskan pada tabel 3.6.

Tabel 3.5. Matriks SWOT – Interaksi IFAS – EFAS (*Internal Factor Analysis System - External Factor Analysis System*)

		Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	<u>Strategi SO</u>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi yang memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada; ▪ Strategi agresif; ▪ Keunggulan komparatif. 	<u>Strategi WO</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang; ▪ Strategi orientasi putar balik; ▪ Investasi/disvestasi.
	Ancaman (T)	<u>Strategi ST</u>	<u>Strategi WT</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman; ▪ Strategi diversifikasi; ▪ Mobilisasi.

Sumber: Nining I. Soesilo, 2002

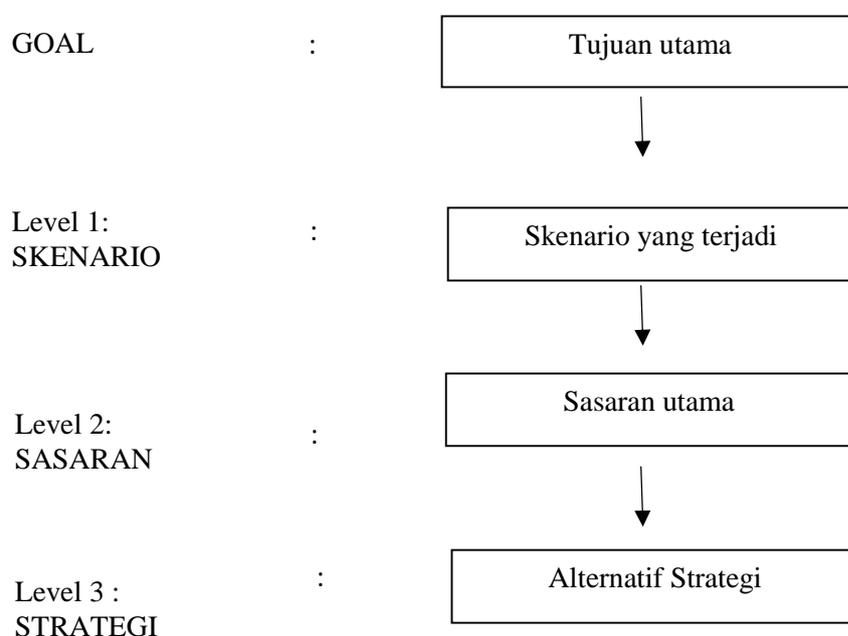
3.3.2 Analytical Hierarchy Process (AHP)

Menurut Hutasoit (2005) dari hasil analisa SWOT didapatkan beberapa alternatif kebijakan perpaduan faktor internal dan eksternal yang belum tentu seluruhnya dapat dilakukan secara bersamaan atau simultan karena berbagai keterbatasan

sumber daya. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu lebih lanjut dilakukan pemilihan prioritas untuk mendapatkan strategi kebijakan yang perlu mendapat perhatian lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penentuan prioritas dari alternatif-alternatif kebijakan yang telah dipilih melalui SWOT pada penelitian ini dilakukan dengan analisa AHP.

3.3.2.1 Prinsip Penyusunan Hirarki

Dalam penelitian ini, hirarki yang akan digunakan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah yang terbaik adalah hirarki yang terdapat pada diagram 3.2. Alternatif strategi yang digunakan merupakan hasil dari analisis SWOT yang telah dilakukan sebelumnya. Hirarki dari metode ini, dibagi menjadi *Goal*, Skenario, Sasaran, Strategi, seperti terlihat pada diagram hirarki AHP berikut dibawah ini :



Gambar 3.2 Penyusunan Hirarki Model AHP

3.3.2.2 Penilaian Kuisisioner AHP

Setelah proses penyusunan hirarki, proses berikutnya adalah proses menetapkan kriteria. Proses ini merupakan proses yang penting dalam penggunaan model AHP, dimana dalam proses ini dilakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) antar berbagai kriteria yang telah ditetapkan, yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan mana diantara dua yang dianggap penting/ disukai/ mungkin terjadi;
2. Menentukan berapa kali lebih penting/disukai/mungkin terjadi;

Seluruh prioritas yang ada dibandingkan satu sama lain secara berpasangan dan diberi bobot berupa skala dari 1 sampai dengan 9, dengan penjelasan seperti pada tabel 3.6.

Tabel 3.6. Skala Perbandingan Secara Berpasangan

Skala	Artinya	Keterangan
1	Kedua elemen sama pentingnya (<i>equal importance</i>)	Kedua elemen yang diperbandingkan memberikan kontribusi yang sama besar untuk mencapai tujuan.
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen yang lainnya (<i>moderate importance</i>)	Pengalaman dan penilaian agak sedikit menyukai sebuah elemen daripada elemen lainnya.
5	Elemen yang satu lebih penting Dari Elemen yang lainnya (<i>essential/ strong importance</i>)	Pengalaman dan penilaian lebih kuat menyukai sebuah elemen daripada elemen lainnya.
7	Elemen yang satu sangat lebih penting dari elemen yang lainnya (<i>very strong importance</i>)	Sebuah elemen sangat lebih disukai daripada elemen yang lainnya, dominasinya terlihat nyata dalam keadaan yang sebenarnya
9	Elemen yang satu mutlak lebih penting dari elemen yang lainnya (<i>extreme importance</i>)	Sebuah elemen mutlak lebih kuat disukai dari yang lainnya dan berada pada tingkat tertinggi.
2,4,6,8	Merupakan angka kompromi diantara penilaian diatas	Bila kompromi diperlukan diantara dua pertimbangan/ penilaian.

Sumber: Saaty (1986)

Setelah hirarki dapat tersusun selanjutnya dilakukan pengisian persepsi ahli dengan cara membandingkan antara elemen-elemen di dalam satu level dengan tetap memperhatikan pengaruh pada level di atasnya.

3.3.2.3. Penentuan Responden

Pengisian kuisisioner bertujuan untuk menjaring persepsi responden sebagai *expert* untuk menghasilkan data primer. Penggunaan kuisisioner ini dipilih karena cara konsensus, yaitu dengan mengumpulkan para responden secara bersamaan dalam tempat dan waktu yang sama, sangat sulit untuk dilakukan. Responden dipilih berdasarkan partisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan, dan pengetahuan serta pemahaman responden terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Penentuan jumlah ahli pembangunan daerah yang disyaratkan sebagai responden untuk memberikan penilaian pada kuisisioner AHP sebenarnya sangat relatif. Satu orang yang benar-benar menguasai permasalahan bisa saja memberikan hasil yang lebih baik daripada penilaian banyak responden yang tidak terlalu memahami permasalahan. Namun, apabila respondennya terlalu sedikit, dan apabila penilaian yang diberikan bias, maka hasil analisis secara keseluruhan akan menjadi kurang baik.

Untuk menghindari hal tersebut, maka *expert* yang dipilih jumlahnya tidak terlalu sedikit, sehingga apabila ada penilaian yang agak janggal dapat dinetralkan dengan penilaian rata-rata sejumlah *expert*. Pada penelitian ini, ahli pembangunan daerah yang diminta untuk menjadi responden kuisisioner AHP sebanyak 7 orang. Adapun responden yang diminta melakukan pengisian kuisisioner AHP adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7. Daftar Responden Kuisisioner AHP

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1	Responden 1	Kabid. Fisik	Bappeda Lampung Barat
2	Responden 2	JFU Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3	Responden 3	Sekretaris	Bappeda Lampung Barat
4	Responden 4	Kasi Bina Usaha Tani Tanaman Pangan	Dinas Pertanian Lampung Barat
5	Responden 5	Kasi Peningkatan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR
6	Responden 6	Sekretaris	Dinas Pariwisata Lampung Barat
7	Responden 7	Tokoh masyarakat	

3.3.2.4. Perumusan Strategi

Pengolahan data dengan metode AHP ini dilakukan dengan memberikan bobot kepada masing-masing responden. Pemberian bobot ini didasarkan pada pengetahuan atau pengalaman para responden dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, berperan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dan dianggap memiliki pengetahuan yang cukup mendetail mengenai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Lampung Barat dalam rangka melaksanakan pembangunan. Adapun pemberian bobot masing-masing responden dijelaskan pada tabel 3.8.

Tabel 3.8. Pembobotan Responden

Nama	Jabatan	Unit Kerja	Bobot
Responden 1	Kabid. Fisik	Bappeda	0,20
Responden 2	JFU Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	0,20
Responden 3	Sekretaris	Bappeda	0,20
Responden 4	Kasi. Bina Usaha Tani Tanaman Pangan	Dinas Pertanian Lampung Barat	0,20
Responden 5	Kasi Peningkatan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR	0,08
Responden 6	Sekretaris	Dinas Pariwisata Lampung Barat	0,08
Responden 7	Tokoh masyarakat/ pengamat pembangunan		0,04
Total			1,00

3.3.2.5. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam metode AHP ini akan dilakukan dengan menggunakan *software Expert Choice V.11*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian terhadap penilaian kuisisioner SWOT oleh para responden yang dianggap ahli, dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

A. Faktor Kekuatan

Faktor kekuatan (*strength*) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang diharapkan dapat menjadi solusi masalah di daerah Kabupaten Lampung Barat adalah:

1. Kabupaten Lampung Barat sebagai daerah pertanian dan perkebunan
2. Potensi pariwisata yang ada sebagai modal dasar pengembangan sektor pariwisata
3. Masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kerukunan antar suku dan agama
4. Akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Lampung barat baik dengan nilai rating B
5. Merupakan hulu dari 3 DAS, berperan penting sebagai daerah penyangga dan penjaga sistem hidrologi bagi daerah hilir di provinsi Lampung
6. 59,25% merupakan kawasan hutan, sumberdaya tinggi untuk pelestarian plasmanutfah, pendidikan, penelitian, jasa lingkungan, pariwisata, dan mitigasi bencana
7. Adanya satgas bencana hingga di tingkat kecamatan

8. Ketersediaan sarana kesehatan seperti rumah sakit rujukan dan puskesmas disetiap kecamatan.

B. Faktor Kelemahan

Faktor kelemahan (*weakness*) utama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah:

1. Pola pengolahan dan pemanfaatan lahan belum memperhatikan kaidah-kaidah konservasi
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah
3. Pemerataan hasil-hasil pembangunan daerah
4. Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD Kabupaten Lampung Barat
5. Posisi Kondisi topografi Kabupaten Lampung Barat bervariasi (dataran tinggi, dataran rendah dan daerah dengan susunan bebatuan yang berbeda-beda)
6. Keberadaan hutan masih memicu terjadinya konflik tenurial, sosial dan perizinan pemanfaatan untuk kebutuhan dasar (kesejahteraan)
7. Konektivitas antar pusat-pusat produksi, pengolahan hingga pasar
8. Kurang memadainya sarana dan prasarana mitigasi kebencanaan (mobilisasi, jalur evakuasi, tampungan air,dll)
9. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
10. Rata-rata produksi hasil perkebunan kopi masih rendah bila dibandingkan negara penghasil kopi lainnya

11. Infrastruktur terbangun belum memadai untuk peningkatan akses pelayanan baik menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih, listrik, sanitasi, perumahan).

C. Faktor Peluang

Faktor peluang (*opportunity*) yang utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah:

1. Berbagai Undang-undang tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam upaya pembangunan Kabupaten Lampung Barat
2. Berbagai program pemerintah pusat dalam upaya mendukung pembangunan di Kabupaten Lampung Barat
3. Ketersediaan dana desa dan pusat serta provinsi sebagai komitmen peanggulungan desa tertinggal
4. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat
5. Janji politik kepala daerah untuk menjadikan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Tangguh Bencana
6. Kondisi sosial politik di Kabupaten Lampung Barat dalam upaya mendukung pembangunan
7. Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah
8. Kemajuan teknologi yang sangat pesat dalam upaya meningkatkan efisiensi di lingkungan.

D. Faktor Ancaman

Faktor ancaman (*threat*) yang utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah:

1. Persaingan produk hasil perkebunan sejenis dengan daerah lain
2. Fluktuasi harga komoditas hasil perkebunan
3. Investasi swasta di lingkungan Kabupaten Lampung Barat
4. Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia
5. Daerah rawan bencana alam tanah longsor, banjir dan gempa bumi

E. Alternatif Strategi

Berdasarkan hasil pembobotan terhadap kuisisioner SWOT, maka usulan strategi alternatif yang dapat direkomendasikan adalah strategi *strength - opportunity (SO)*, yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan alternatif strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi lahan pertanian, perbaikan fungsi lahan, diverifikasi produk olahan hasil pertanian dan perkebunan.
2. Pengelolaan sumberdaya hutan, dengan menetapkan tata hutan sehingga di dapat zona hutan sesuai karakteristiknya baik yang berhubungan dengan tata batas maupun penatagunaan hutan, serta dilakukan penyusunan rencana pengelolaan hutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
3. Pembangunan sektor pariwisata berbasis *eco tourism park* dan wisata budaya
4. Perbaikan sistem perizinan yang cepat, mudah dan murah untuk memacu pertumbuhan investasi
5. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan sentra komoditas unggulan
6. Penggunaan dana desa tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kemajuan sektor pertanian dan pariwisata.

7. Perluasan cakupan layanan infrastruktur teknologi, telekomunikasi dan informasi.

F. Prioritas Kebijakan Pembangunan

Prioritas kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur
2. Optimalisasi lahan pertanian
3. Penggunaan dana desa tepat sasaran
4. Perbaiki sistem perizinan usaha
5. Pengelolaan hutan
6. Pembangunan Sektor pariwisata
7. Perluasan jaringan teknologi, telekomunikasi dan informasi.

5.2 Saran

Saran yang bisa disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk peningkatan aksesibilitas dapat diusulkan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk memulai konektivitas Kabupaten Lampung Barat ini dimulai dengan pengiriman hasil perkebunan yang terkoneksi dengan Pelabuhan Krui, kakao di Tanggamus yang terkoneksi dengan Pelabuhan Batu Balai, hasil perikanan di Selat Sunda yang terkoneksi dengan dermaga Bengkurat, potensi padi, kakao, pisang di Pesawaran melalui Gedong Tataan dan Padang Cermin didistribusikan ke Bandar Lampung lalu melalui terminal agribisnis dipasarkan di Jakarta dan melalui Pelabuhan Panjang di ekspor ke Jepang maupun Timur Tengah. Produk perkebunan kelapa dalam, kopi dan

lada dari Tanggamus didistribusikan ke pusat pengumpul Kota Agung. Demikian juga dengan produk peternakan sapi dan kambing. Dari Kota Agung dibawa ke Bandar Lampung dan melalui Pelabuhan Panjang dibawa ke pemasaran baik yang ada di Pulau Jawa maupun daerah lain di Indonesia maupun yang diekspor ke luar negeri seperti Amerika, Jepang, Timur Tengah dan Eropa.

Melihat perkembangan produksi baik pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata yang sangat potensial di Lampung Barat pengembangan infrastruktur yang diusulkan adalah pengembangan pelabuhan. Pelabuhan yang ada di Kabupaten Lampung Barat belum optimal fungsinya. Saat ini kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung barat adalah prioritas pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi pendukung, seperti jalan kabupaten dan lingkungan, penataan infrastruktur Kota Liwa sebagai ibu kota Lampung Barat, penyelesaian pembangunan stadion, penyediaan sarana air bersih, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan untuk warga Kabupaten Lampung Barat, termasuk pembangunan infrastruktur khususnya jalan di wilayah perdesaan Lampung Barat, seperti di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Suoh dan Pagar Dewa. Sehingga transportasi Kabupaten Lampung Barat dapat memiliki aksesibilitas lebih baik.

2. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk memberikan dukungan agar peran petani menjadi maksimal. Dukungan tersebut berupa bantuan modal, peningkatan pengetahuan dan kemampuan, teknologi pertanian, sarana prasarana produksi pertanian dan pengembangan

kelembagaan (pemerintah atau swasta) sehingga pembangunan pertanian dapat dilaksanakan lebih terarah. Selain itu disarankan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk menggunakan metode transformasi pertanian yang dilaksanakan dengan pendekatan sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang mencakup sistem usaha pertanian terpadu pada tingkat mikro usahatani, sistem rantai nilai terpadu pada tingkat pasar atau rantai pasok dan sistem pertanian biorefinery terpadu pada tingkat industri atau komoditas. Sistem tersebut berlandaskan pada pemanfaatan berulang zat hara atau pertanian agroekologi seperti sistem integrasi tanaman-ternak-ikan dan sistem integrasi usaha pertanian-energi (biogas, bioelektrik) atau sistem integrasi usaha pertanian biorefinery yang termasuk pertanian hijau merupakan pilihan sistem pertanian masa depan yang cocok diterapkan di Kabupaten Lampung Barat, karena tidak saja meningkatkan nilai tambah dari lahan tetapi juga ramah lingkungan. Ekonomi yang dibangun melalui pembangunan sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan adalah sistem ekonomi yang berakar kokoh pada keragaman sumber daya pertanian yang dimiliki di setiap daerah di Kabupaten Lampung Barat, dengan pelaku ekonomi yang tidak hanya melihat kepentingan jangka pendek melainkan yang mampu melihat kepentingan jangka panjang.

3. Dana desa di Kabupaten Lampung Barat dianggap masih lemah dalam konteks tepat sasaran untuk menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat seperti penyediaan sanitasi dasar dan relatif masih kurangnya ekonomi produktif. Untuk mengoptimalkan potensi masing-masing desa, partisipasi masyarakat diperlukan untuk pembangunan desa. Mendorong penggunaan dana desa

untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan Kabupaten.

4. Kemajuan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat tidak lepas dari peran investasi. Disarankan kepada Kabupaten Lampung Barat untuk tetap berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Langkah yang dapat ditempuh untuk merangsang iklim investasi yang baik yaitu dengan perbaikan sistem perizinan yang cepat, mudah dan murah dengan tidak mengabaikan kehati-hatian. Sehingga dengan pertumbuhan investasi yang baik juga akan memberikan dampak positif untuk Lampung Barat seperti pengembangan sektor usaha baru, memperluas pasar, peningkatan daya saing, pengembangan teknologi baru, penyerapan lapangan pekerjaan baru dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga membuka kesempatan bagi masyarakat Lampung Barat untuk berpartisipasi didalam pembangunan Kabupaten Lampung Barat melalui berinvestasi di bidang perkebunan hortikultura dan kopi serta pariwisata yang menjadi potensi keunggulan Kabupaten Lampung Barat.
5. Disarankan untuk pengelolaan hutan di Kabupaten Lampung Barat tetap diatur menggunakan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm), dimana kebijakan Hutan Kemasyarakatan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar

kawasan hutan. Di Sumber Jaya, Lampung Barat, dalam penerapan HKm di tingkat lapang, selain penguatan kelembagaan masyarakat, juga dilakukan penguatan teknis meliputi teknis konservasi lahan dan diversifikasi tanaman dengan pola tajuk tinggi, sedang dan bawah. Proses perubahan tutupan lahan, yang semula degradasi menjadi sistem hutan kebun melalui *agroforestri* tersebut, diyakini dapat mendukung mitigasi perubahan iklim (*Climate Change*). Berikut ini sisi positif dari HKm di Kabupaten Lampung Barat :

- a. Pada tahun 2005, beberapa bagian wilayah hutan sudah berubah menjadi kebun campuran dengan jenis tanaman kemiri, alpukat, nangka, durian, mahoni, cempaka, sukun, pinang, dan lain-lain.
 - b. Sebelum masyarakat membentuk kelompok HKm, pada tahun 1994 ditemukan banyak titik api pada kawasan hutan lindung reg 39. Setelah mengikuti kegiatan HKm, melalui diversifikasi tanaman, ditemukan penurunan luasan titik api pada lokasi tersebut.
 - c. Aktivitas HKm dan pengembangannya juga menuju 3 dari 7 misi *Millenium Development Goals* (MDG's) mengurangi kemiskinan, pelibatan kaum perempuan (*Gender Perspective*) dan pelestarian lingkungan.
6. Untuk mengoptimalkan potensi pariwisata dan potensi hasil pertanian dan perkebunan, langkah awal yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Lampung Barat adalah dengan membangun infrastruktur pendukung pertanian dan akses tempat pariwisata. Semakin banyak jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar daerah di Kabupaten Lampung Barat, semakin besar dan mudah pula daerah tersebut terkoneksi dengan daerah lainnya.

Peningkatan aksesibilitas daerah dengan pembangunan infrastruktur dapat mengatasi beberapa hambatan mobilitas, percepatan pembangunan dan peningkatan efektivitas pembangunan antar kawasan, sehingga target peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Kemudian demi peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Lampung Barat disarankan untuk melibatkan pihak masyarakat untuk membangun dan menjaga sarana, prasarana dan infrastruktur akses pendukung pariwisata, menjaga dan merawat situs-situs atau lokasi-lokasi wisata yang ada, kemudian melakukan promosi-promosi pariwisata yang lebih baik melalui biro wisata yang ada baik di Kabupaten Lampung Barat maupun biro wisata nasional.

7. Disarankan diadakan perluasan jaringan teknologi, informasi dan komunikasi untuk akses informasi yang lebih luas di Kabupaten Lampung Barat yang nantinya akan memberikan dampak yang positif untuk masyarakat Lampung Barat. Dengan perluasan jaringan telekomunikasi masyarakat di daerah terpencil dapat mengakses dan melakukan pertukaran informasi yang berguna untuk aktivitas sehari-hari. masyarakat dapat mengakses kejadian terkini di daerahnya, akses informasi perubahan harga komoditas, akses informasi kebijakan terbaru dari instansi terkait, pemasaran produk lokal berbasis *online shop* dan akses informasi lainnya yang dapat berguna untuk pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Taufik Zainal. 2012. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Sektor Potensial Di Kabupaten Asahan (Pendekatan Model Basis Ekonomi Dan Swot)*. Masters Thesis, UNIMED. Medan
- Anwar, A. dan Setiadi. 1996. *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. Jakarta: Prisoana.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
-, 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Asri, A. 2010. *Strategi Kebijakan Pembangunan daerah Kabupaten Klaten : Pendekatan Analisis SWOT dan AHP*. Universitas Indonesia, Jakarta
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. *Tata cara Perencanaan Pengembangan Kawasan Untuk Percepatan Pembangunan Daerah*. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat. 2016. *Kabupaten Lampung Barat Dalam Angka 2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat. Lampung Barat
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat. 2017. *Kabupaten Lampung Barat Dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat. Lampung Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2017. *Provinsi Lampung Dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Lampung.
- Bappeda Kabupaten Lampung Barat. *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022*
- Bappeda Kabupaten Lampung Barat. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017*.
- Brigham, Eugene F and Joel F. Houston. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen. Keuangan*. Alih Bahasa : Ali Akbar Yulianto, Buku satu, Edisi sepuluh. Jakarta : Salemba Empat.

- Brojonegoro PS, Bambang. 1992. *AHP (the Analytical Hierarchy Process)*. Pusat Antar University – Studi Ekonomi Universitas Indonesia;
- Djunaedi, A. 2002. *Proses Perencanaan Strategis Kota/Daerah*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2002
- Djuwendah, Endah., *et al.*, 2013, *Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal di Kabupaten Garut*, Jurnal Sosiohumaniora Vol. 15, No. 2, Juli 2013, 211 – 221.
- Ekaputra, H Nofidi. 2009. *Kajian Pengembangan Strategi Di Wilayah Pesisir Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Giatman, M. 2007. *Ekonomi Teknik*, Edisi Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Grant, Eugene L, Grant Ireson and Richard S. Leavenworth. 1996. *Dasar-dasar Ekonomi Teknik (Terjemahan)*, Edisi Ketiga, Jilid Pertama. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hutasoit, Donal. 2005. *Strategi Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Rangka Mengurangi Laju Kerusakan Hutan: Suatu Pendekatan Analisis SWOT dan AHP*. Universitas Indonesia.
- I Nyoman, Sumaryadi. 2005. *Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : Citra Utama
- Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. 2004. *Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal*. Departemen Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Jakarta
- Mardianto, Sudi dan Ahmad Djauhari. 2016. *Pendekatan Pembangunan Pertanian Berbasis Komoditas vs Ekoregion : Upaya Mencari Jalan Tengah*. *Jurnal Litbang Pertanian*. 2016.
- Patton, M Quinn. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Pengembangan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Sampang* Ovi Resia Arianti Putri, Eko Budi Santoso 2012 *JURNAL TEKNIK ITS* Vol. 1, Surabaya
- Pembanguna daerah, sektor, dan nasional* (penulis Drs. Khuldun Munji). elearningrri.net/materipim3/pdsn.ppt. diakses pada tanggal 8 November 2017.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2016 tentang *Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Daerah Tertinggal Secara Nasional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*.

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No.3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Daerah Tertinggal secara Nasional
- Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010- 2025
- Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019
- Rahmat, Basuki. 2009. Strategi Pengembangn Produk Unggulan Wilayah Pegunungan dan Pesisir Kabupaten Lampung Barat. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Rangkuti, Freddy. 1997. Analisis SWOT Teknik Membelah Kasus Bisnis. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Saaty, L. Thomas. 2000. *Decision Making For Leaders*. University of Pittsburgh;
- _____, 1993, Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin: Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks., Pustaka Binaman Pressindo.
- Sitinjak, Robert. 2000. *Strategi Kebijakan Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia: Analisis SWOT dan AHP*. [Thesis].Universitas Indonesia;Jakarta
- _____. 2002. *Manajemen Stratejik di Sektor Publik (Pendekatan Praktis), Buku II*. Universitas Indonesia
- Soesilo, I Nining. 2002. *Reformasi Pembangunan Perlu Pendekatan Manajemen Strategik, Buku I*. Universitas Indonesia;
- Stiglitz, Joseph. 1998. *Toward New Paradigm for Development: Strategies, Policies, and Processe*.
- Suganda, Emirhadi. 2008. Pendekatan SWOT dan AHP pada Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Pesisir (Kasus: Pulomerak-Bojonegara Universitas Indonesia, Jakarta
- Sulistyorini, Rahayu. 2012. Peluang Pengembangan Transportasi Intermoda Di Provinsi Lampung. *Seminar Nasional Peranan Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah, Magister Teknik Sipil UNILA Bandar Lampung, 3 Mei 2012*.

- Susaei.Apriana. 2011. Evaluasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Di Kabupaten Barru :Universitas Indonesia.
- Syahza, Almasdi & Suarman. 2013. Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Universitas Riau. Vol 14 No. 1 hlm. 126-139
- Syahza, Almasdi. 2012. *Perumusan Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Dan Pemetaan Potensi Ekonomi Bagi Masyarakat Wilayah Pesisir Di Propinsi Riau*. Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru.
- Todaro. M.P., 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (H.Munandar, Trans.Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Erlangga.
- Umar, Husein. 2001. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991
- Zulkarnain. Alfian.2013. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Belitung. Universitas Indonesia;